

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanah Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, penyusunan Laporan Kinerja merupakan kewajiban bagi seluruh instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, penilaian hasil kinerja dan transparansi serta wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat. Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar tahun 2021 merupakan pelaporan tahun pertama pada periode Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar tahun 2021-2026. Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar 2021 adalah gambaran kinerja dari seluruh unit kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dengan mengevaluasi dan menganalisis kinerja pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2021.

Tugas utama Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar adalah memajukan infrastruktur Kota Makassar yang lebih baik disetiap tahunnya baik dari segi pembangunan dan pemeliharaan. Dinas Pekerjaan Umum bekerja sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab masing-masing secara profesional dan terkoordinasi. Sebagai pertanggung jawaban atas kinerja selama tahun anggaran 2021, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada semua pihak khususnya mengenai kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2021. Hal ini untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes*. Di sisi yang lain, penyusunan LKjIP Dinas Pekerjaan Umum kota Makassar juga dimaksudkan sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan *good governance*.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang telah kami lakukan sepanjang tahun 2021, Secara umum Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar telah berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar merupakan wujud Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar kepada Publik yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan. Hal lain bahwa Laporan Akuntabilitas ini merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan Kinerja di tahun-tahun yang akan datang, agar Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya

Akhirnya, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar mengajak kepada seluruh lapisan Masyarakat untuk secara bersama-sama, bersungguh-sungguh, ikhlas, serta penuh semangat untuk kinerja lebih baik lagi ditahun mendatang. Sehingga kita yakin dapat mewujudkan Kota Makassar menjadi Liveable City dan Reslient City.

Makassar, Januari 2022
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA MAKASSAR,**

ZUHAELSI ZUBIR, ST, MT
Pangkat : Pembina
NIP. 19770707 200212 2 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum LKjIP	1
B. Struktur Organisasi.....	10
C. Fungsi	20
D. Maksud dan Tujuan	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
Rencana Strategis	23
Tujuan dan Sasaran.....	25
Strategi	26
Perencanaan Kinerja.....	27
Program Kegiatan	28
Perjanjian Kinerja	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Pelayanan Dinas pekerjaan Umum Kota Makassar.....	43
B. Analisis Atas Capaian Keuangan	83
BAB IV PENUTUP	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM LKJIP

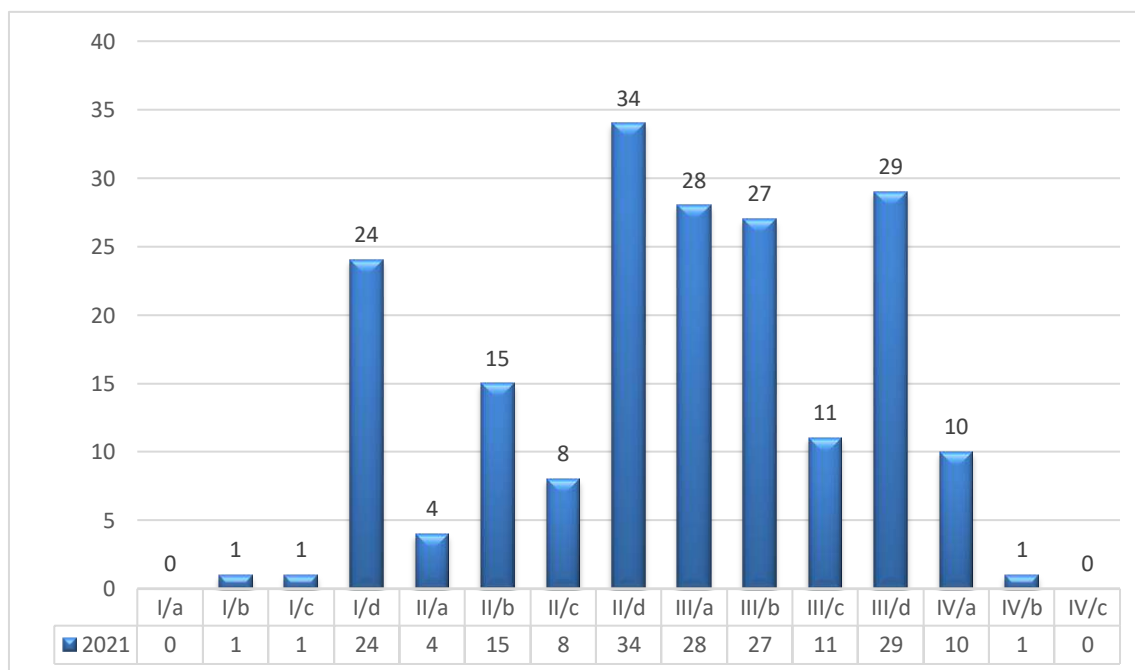
Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkannya akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan. Untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan, maka perlu terlebih dahulu dianalisa lingkungan strategis yang mempengaruhi yaitu :

1. Lingkungan Internal

a) Sumber Daya Manusia

Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pekerjaan Umum saat ini jumlah Pegawai Negeri Sipil 193 orang dan Pegawai Honorar/TKS 287 orang yang terbagi pada masing-masing Bidang, Sekretariat dan UPTD dengan komposisi 27 orang memegang jabatan struktural dan 453 orang sebagai staf, kondisi Sumber Daya Manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel – tabel berikut ini :

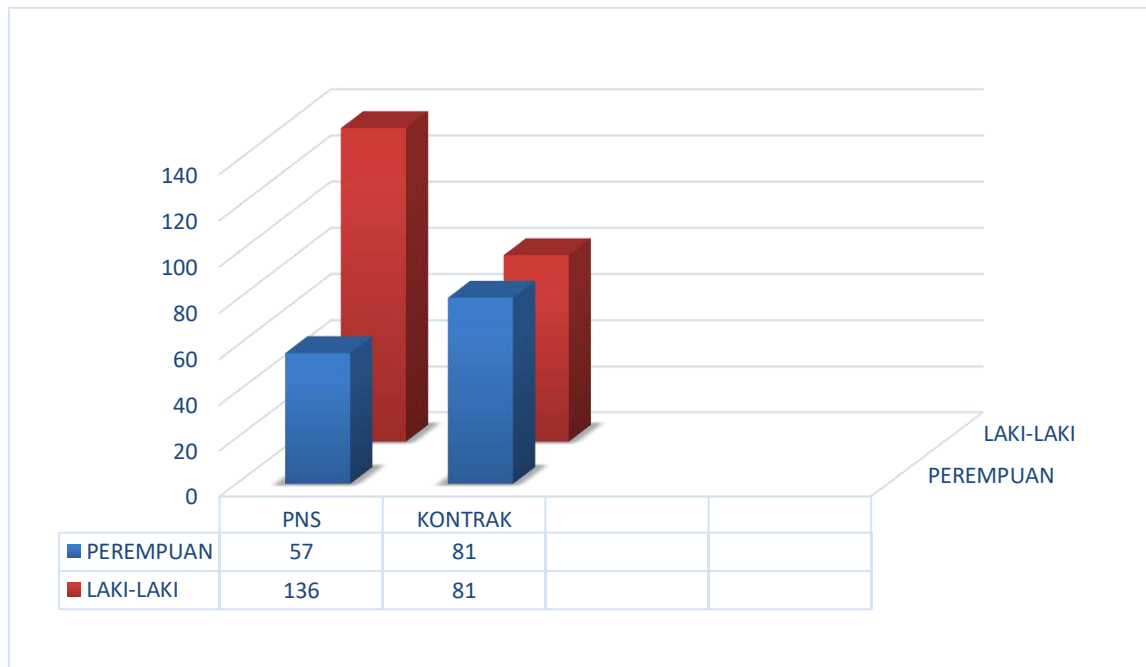
Tabel 1.1 Gambaran Keadaan Pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Berdasarkan Pangkat dan Golongan Mulai Tahun 2021



Sumber : Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum, 2021

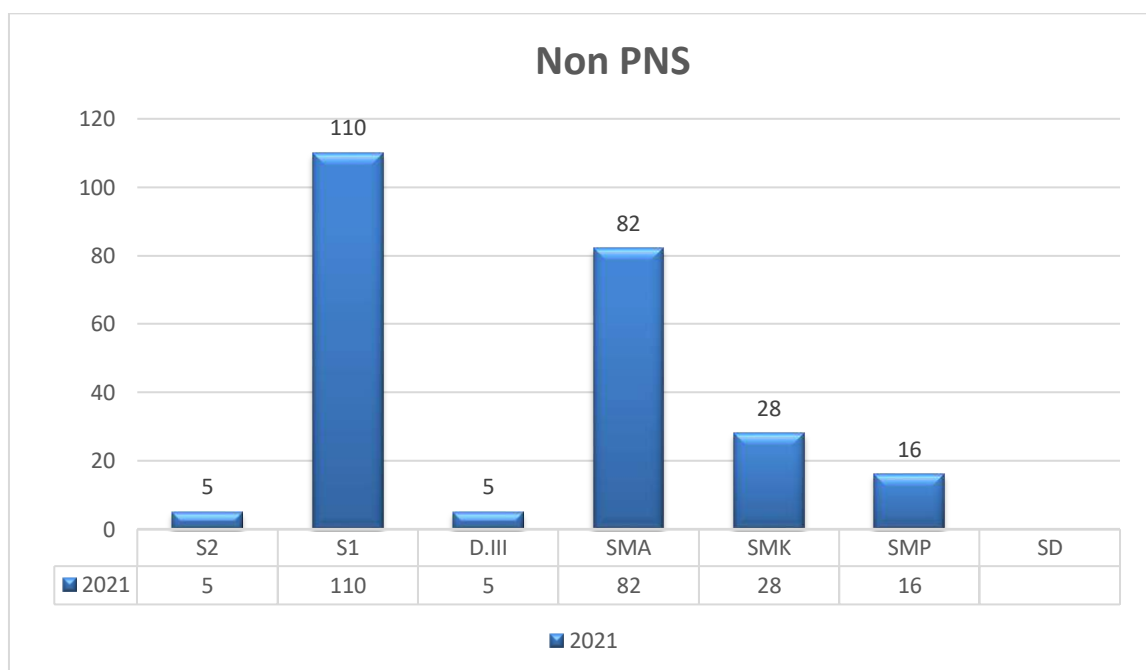
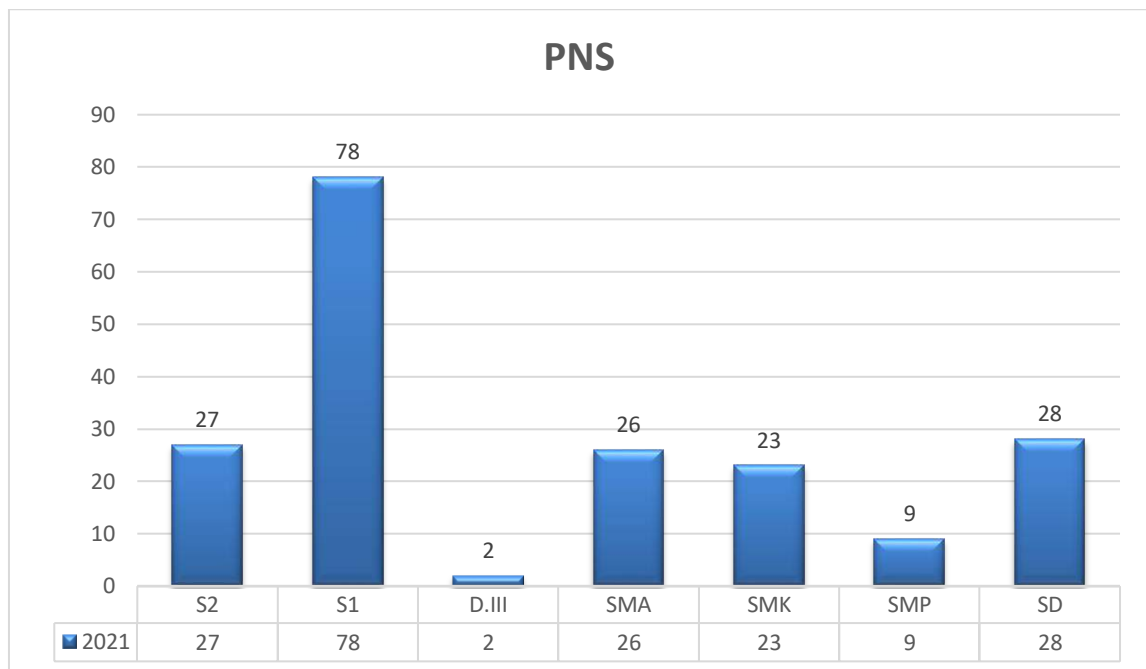
Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa dari 193 orang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Jumlah terbanyak adalah golongan II/d yakni 34 orang kemudian golongan III/d yakni 29 orang , golongan III/a yakni 28 orang , golongan III/b yakni 27 orang, golongan I/d sebanyak 24 orang, golongan II/b yakni 15 orang, golongan III/c 11 orang, golongan IV/a 10 orang, golongan II/c 8 orang , golongan II/a sebanyak 4 orang dan golongan I/b, I/c dan IV/b masing-masing berjumlah 1 orang. Data tersebut belum termasuk data tenaga Non PNS yang berjumlah 287 orang sehingga total keseluruhan pegawai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dan tenaga Honorer/Tenaga Non PNS berjumlah 453 orang.

Tabel 1.2. Gambaran Keadaan Pegawai di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Berdasarkan Status Kepegawaian.



Sumber : Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum, 2021

Untuk susunan pegawai berdasar jenjang pendidikan dan status kepegawaian, dapat dilihat pada tabel 1.3.1 dan 1.3.2



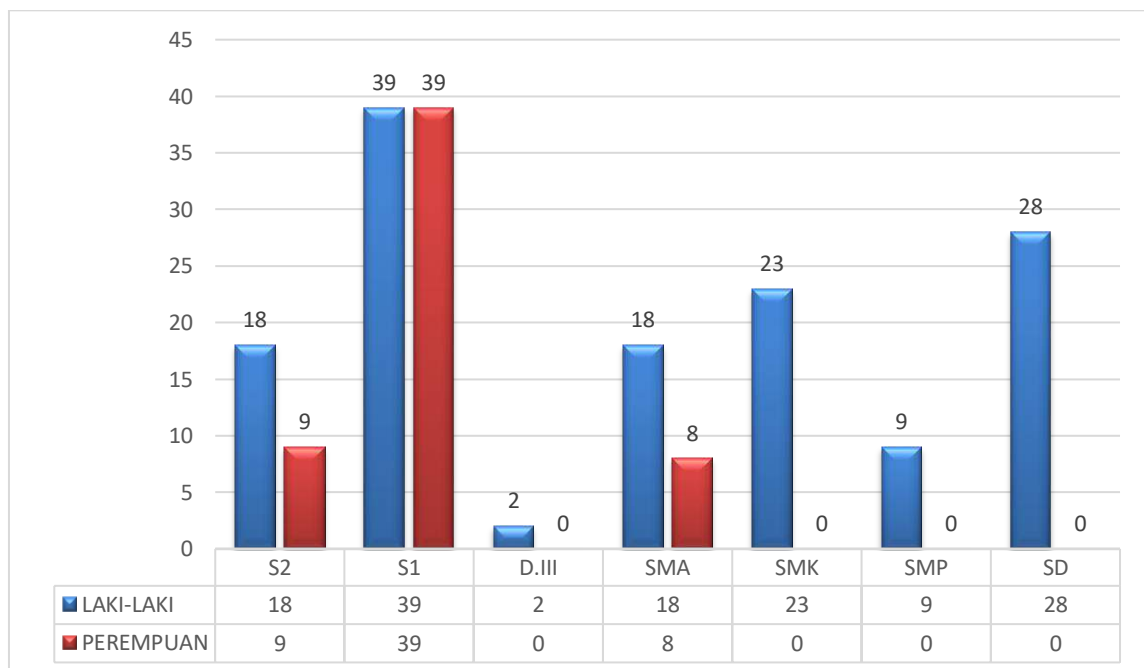
Sumber : Sub Bagian umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum, 2021

Tabel 1.3.1. dan Tabel 1.3.2. Gambaran Keadaan Pegawai (PNS & Non PNS) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Data pada tabel 1.3.1 menunjukkan bahwa dari 193 orang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, jumlah terbanyak adalah pegawai dengan pendidikan S1 yakni 78 orang, selanjutnya jenjang pendidikan SD yakni 28 orang, jenjang pendidikan S2 berjumlah 27 orang kemudian jenjang pendidikan SMA yakni 26 orang dan SMK berjumlah 23 orang, jenjang pendidikan Diploma III berjumlah 2 orang.

Sedangkan pada tabel 1.3.2 menunjukkan bahwa dari 287 orang Pegawai Honorer/Kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, jumlah terbanyak adalah yang berpendidikan S1 sebanyak 110 orang, kemudian dengan tingkat pendidikan SMA Sederajat berjumlah 82 orang dan jenjang pendidikan SD berjumlah 41 orang, Pendidikan SMK 28 orang, smp 16 orang, serta jenjang pendidikan S2 dan D.III sebanyak masing-masing 5 orang.

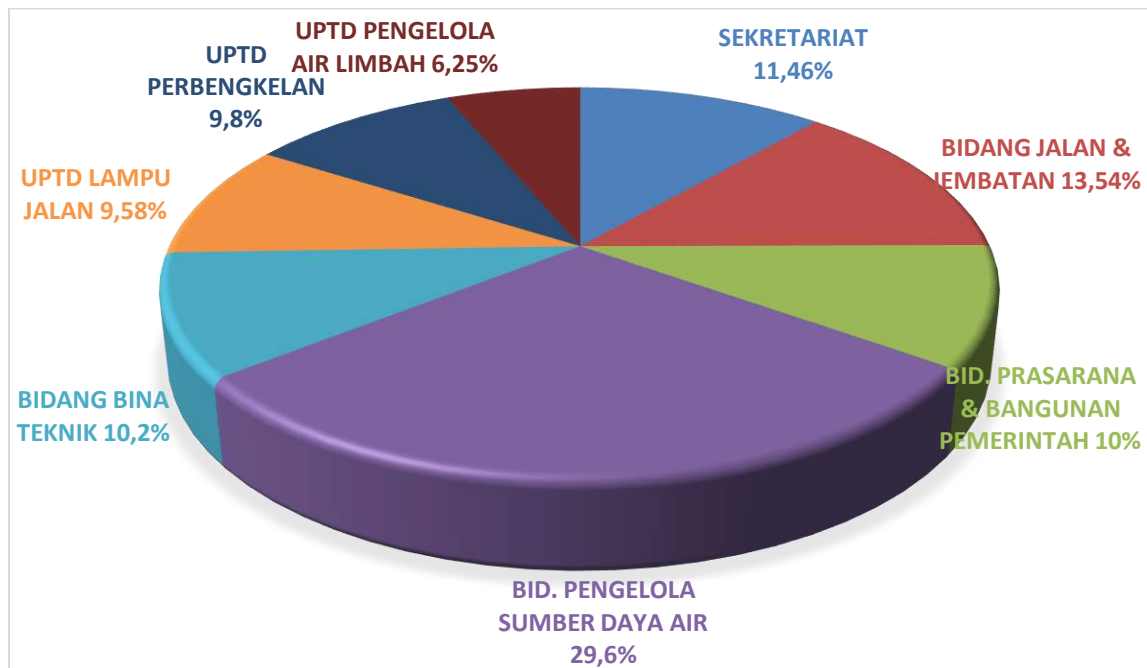
Tabel 1.4. Gambaran Keadaan Pegawai di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Berdasarkan Jenjang Pendidikan berdasarkan jenis kelamin.



Sumber : Sub Bagian umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum, 2021

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa PNS Laki-laki pada Dinas Pekerjaan Umum berjumlah 137 orang atau sebesar 70,9 % dan PNS Perempuan berjumlah 56 orang atau sebesar 29,1 % yang tersebar pada Sekretariat, Bidang – bidang dan UPTD.

Tabel 1.5 Gambaran Keadaan Pegawai di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Berdasarkan pembagian pada Sekretariat, Bidang dan UPTD.



No	Unit	Laki-laki	Perempuan
1	Sekretariat	22	33
2	Bidang Jalan dan Jembatan	49	16
3	Bidang Prasarana dan Bangunan Pemerintah	22	26
4	Bidang Pengelola Sumber Daya Air dan Drainase	126	14
5	Bidang Bina Teknik	25	24
6	UPTD Lampu Jalan	39	7
7	UPTD Perbengkelan	33	14
8	UPTD PAL	26	3
Jumlah		342	138

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum, 2021 (Termasuk Pegawai kontrak)

b) Perlengkapan

Secara garis besar, perlengkapan/barang asset yang ada dan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar terdiri atas 6 (enam) bagian besar, yakni tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi barang bercorak kesenian/kebudayaan serta konstruksi dalam pengerjaan. Mengenai jumlah dan nilai dari perlengkapan dan barang tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.6. Rekapitulasi Daftar Asset Perlengkapan/Barang di Lingkungan
Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2021**

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI	KET
1.	Tanah	3.294	20.423.438.442.667	
2.	Peralatan dan Mesin	3.474	145.793.874.768	
	Alat-alat besar	143	87.614.082.034	
	Alat-alat angkut	352	27.664.613.906	
	Alat-alat bengkel & alat ukur	855	12.328.670.900	
	Alat-alat kantor & rumah tangga	1.132	6.765.668.057	
	Alat-alat studio & komunikasi	163	2.312.019.050	
	Alat-alat kedokteran dan kesehatan	19	130.324.000	
	Alat-alat laboratorium	158	2.360.873.604	
	Alat-alat persenjataan	108	434.920.000	
	Komputer	509	5.883.883.217	
	Alat Keselamatan kerja	35	298.870.000	
3.	Gedung dan Bangunan	172	164.208.093.288	
	Bangunan Gedung	156	150.906.382.158	
	Bangunan Monumen	7	2.068.462.919	
	Tugu Tiutik kontrol	9	11.233.248.211	
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	20.531	5.974.130.948.804	
	Jalan dan Jembatan	6.886	5.385.557.349.698	
	Bangunan Air Irigasi	1.581	443.277.221.624	
	Instalasi	12.039	140.362.782.933	
	Jaringan	25	4.933.594.550	
5.	Aset Tetap Lainnya	0	0	
6.	Konstruksi dalam pengerjaan	95	29.023.937.410	
	TOTAL	27.566	26.736.595.296.938	

Sumber : Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian, Dinas Pekerjaan Umum 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 6 (enam) jenis Aset yang ada dan dikelola Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, nilai terbesar terletak pada nilai Tanah yaitu sebesar Rp. **20.423.438.442.667,-** kemudian Jalan, Irigasi dan Jaringan yakni Rp. **5.974.130.948.804,-**, kemudian Gedung dan Bangunan Rp. **164.208.093.288,-** Selanjutnya Peralatan dan Mesin Rp. **145.793.874.768,-** lalu Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp. **29.023.937.410,-**. Dan terakhir Aset tetap lainnya Sebesar Rp.0,-.

c) **Anggaran**

Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar mendapat dukungan dana yang diatur dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang meliputi dua komponen yaitu :

- 1) Anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan bersifat internal, berbentuk belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas serta belanja lain-lain yang menyangkut peningkatan kualitas dan kesejahteraan pegawai.
- 2) Anggaran pembangunan yaitu berupa alokasi sejumlah anggaran yang digunakan Dinas pekerjaan Umum Kota Makassar baik rutin maupun pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.7. Perkembangan Alokasi Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

T.A 2021

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1.	Belanja Operasi ;		
	a. Belanja Pegawai	Rp 21.447.624.000,-	Rp 19.968.184.374,-
	b. Belanja Barang & Jasa	Rp. 178.599.557.358,-	Rp 126.140.669.148,-
	c. Belanja Hibah	Rp. 73.579.500.000,-	Rp. 35.078.480.961,-
2.	Belanja Modal ;		
	a. Belanja Modal Tanah	Rp 0,-	Rp 0,-
	b. Belanja Modal Peralatan & Mesin	Rp 14.130.190.970,-	Rp 5.832.725.500,-
	c. Belanja Modal Gedung & bangunan	Rp 24.083.455.630	Rp 1.131.221.500,-
	d. Belanja Modal jalan, jaringan & irigasi	Rp 327.261.898.476,-	Rp 147.293.610.436,-

2. Lingkungan Eksternal

Tujuan dari penyajian profil lingkungan eksternal adalah untuk mengantarkan kondisi lingkungan eksternal yang sangat yang sangat mempengaruhi eksistensi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sehingga nantinya dapat memberikan gambaran berbagai peluang yang perlu dimanfaatkan dan ancaman yang perlu diantisipasi atau meminimalkan ancaman yang ada atau mengambil peluang yang ditawarkan.

Untuk mengenali profil lingkungan eksternal adalah dengan cara memantau faktor-faktor yang secara garis besar menggunakan indikator PEST (Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi)

a) Politik

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, Undang –undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No. 23Tahun 2014 telah memberikan kesempatan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi secara penuh dan otomatis berdampak langsung dengan adanya kewenangan yang lebih besar kepada daerah yang berarti semakin besar pula mandat dan misi yang harus di jalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.

Berlakunya undang-undang ini tidak saja berdampak positif, tetapi disisi lain juga secara bersamaan memberikan peluang dan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Makassar pada umumnya dan khususnya Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, dikatakan peluang karena adanya kesempatan bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota untuk mengembangkan segenap potensi dan sumber daya yang ada secara optimal. Dikatakan sebagai tantangan karena dalam kerangka Negara kesatuan ada beberapa kebijakan dari pemerintah yang lebih tinggi yang tumpang tindih dan tidak sinkron dengan kebijakan daerah.

b) Ekonomi

Dalam melaksanakan tupoksinya, pengalokasian dan ketersediaan anggaran menjadi komponen yang terpenting dalam pelaksanaan pekerjaan tugas pokok dan fungsi organisasi, secara keseluruhan jumlah anggaran yang diperoleh Pemerintah Kota Makassar sangat berpengaruh bagi dinamika kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. Jumlah biaya pembangunan Kota Makassar selama ini masih bertumpu pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Bantuan Pemerintah Pusat.

Untuk melihat faktor-faktor ekonomi yang secara eksternal mempengaruhi eksistensi Dinas Pekerjaan umum Kota Makassar adalah dilihat dari struktur perekonomian masyarakat dan pemerintah. Kemudian dalam mengetahui sektor-sektor yang menjadi prioritas pembangunan harus diketahui sektor yang paling menonjol dan potensial dalam struktur perekonomian kota makassar yang tergambar dan tingkat perkembangan produk Domestik Regional Brutonya (PDRB).

Semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi kota makassar maka semakin baik juga kinerja pembangunan di kota makassar yang sebahagian dari keberhasilan pertumbuhan ekonomi kota tersebut merupakan cerminan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan secara keseluruhan.

c) Sosial

Sebagai daerah terbuka secara umum struktur sosial budaya masyarakat makassar terdiri dari dua kelompok Suku Budaya daerah asli daerah dan budaya penduduk pendatang. Budaya asli daerah disini adalah segala komponen budaya lokal baik yang bersifat material maupun non material yang berasal dari penduduk asli yang terdiri dari budaya kelompok masyarakat makassar, bugis, toraja dan mandar, sedangkan budaya pendatang adalah budaya yang dibawa oleh etnis dari luar daerah diantaranya budaya jawa, melayu dan daerah lainnya. Dari keragaman agama di kota makassar terdapat semua agama besar yang ada di indonesia yaitu islam, kristen protestan, katolik, hindu, budha, dan yang menjadi agama mayoritas yang dianut adalah agama islam.

d) Teknologi

Dengan kemajuan pesat di bidang sistem informasi dan teknologi baik di bidang pengolahan data maupun sarana lain yang mampu meringankan proses pelaksanaan pekerjaan. Penguasaan dan penggunaan teknologi informasi saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok bagi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pada saat ini pada setiap bagian sudah menggunakan sarana komputer dalam menjalankan administrasi maupun proses olah data di kantor maupun dilapangan.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar dan Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum.

Struktur Kelembagaan Pemerintah Kota Makassar mengalami perubahan yang cukup penting dalam bentuk reorganisasi dan strukturisasi dibanding keadaan sebelumnya.

Dengan demikian struktur kelembagaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sebagai berikut :

Kepala Dinas Pekerjaan Umum;

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Program dan Pelaporan

Bidang Jalan dan Jembatan, terdiri atas :

- a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
- b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- c. Seksi Jalan Lingkungan

Bidang Prasarana dan Bangunan Pemerintah, terdiri atas :

- a. Seksi Sanitasi dan Air Bersih
- b. Seksi Pembangunan Gedung Pemerintah
- c. Seksi Pemeliharaan Gedung Pemerintah

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Drainase, terdiri dari :

- a. Seksi Pembangunan Sumber Daya Air dan Drainase
- b. Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Air dan Drainase
- c. Seksi Pengendalian Sumber Daya Air dan Drainase

Bidang Bina Teknik, terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan dan Desain
- b. Seksi Pengawasan Manajemen Konstruksi
- c. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi

UPTD Lampu Jalan, terdiri atas :

- a. Kepala Tata Usaha

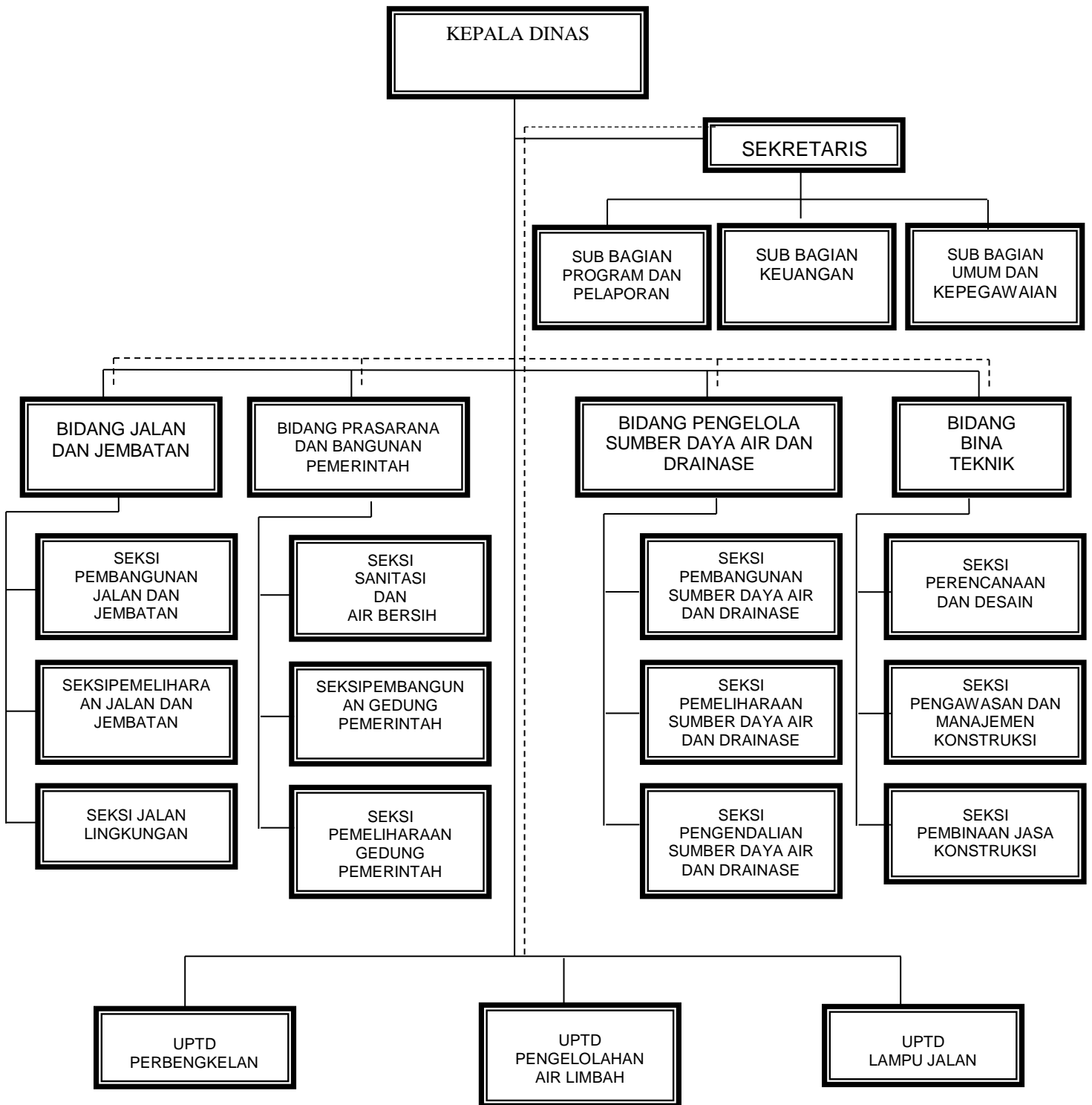
UPTD Perbengkelan

- a. Kepala Tata Usaha

UPTD PAL

- a. Kepala Tata Usaha

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR



Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Adapun Tugas dan Fungsi masing-masing struktural adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas Pekerjaan Umum** mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
 - (1) Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum;
 - b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
 - e. pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan bidang pekerjaan umum;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
 - (2) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai uraian tugas :
 - a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pekerjaan umum;
 - b. merumuskan dan melaksanakan visi dan misi dinas;
 - c. merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat dan Bidang Jalan dan Jembatan, Bidang Prasarana dan Bangunan Pemerintah, Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Drainase, Bidang Bina Teknik;
 - d. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK) dinas;
 - e. mengoordinasikan dan mermuskan bahan penyiapan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;

- f. merumuskan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinas;
- g. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dinas;
- h. mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
- i. merumuskan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan dan jembatan, prasarana dan bangunan pemerintah, pengelolaan sumber daya air, drainase dan bina teknik;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan jalan dan jembatan, prasarana dan bangunan pemerintah, pengelolaan sumber daya air, drainase dan bina teknik;
- k. melaksanakan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- l. melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- n. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- o. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan;
- p. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- q. membina, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- r. melaksanakan pembinaan jabatan fungsional;
- s. melaksanakan pembinaan unit pelaksana teknis;
- t. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada walikota melalui sekretaris Daerah;
- u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh walikota.

2. **Sekretariat** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan dinas. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan operasional urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - c. pengoordinasian urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- 1.2.1 **Sub Bagian Program dan Pelaporan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- 1.2.2 **Sub Bagian Keuangan** mempunyai tugas melakukan administrasi dan akuntansi keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan kegiatan di bidang administrasi dan akuntansi keuangan;
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi dan akuntansi keuangan;
 - c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi dan akuntansi keuangan;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

- 1.2.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melakukan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan kegiatan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian;
 - b. pelaksanaan kegiatan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian;
 - c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- 1.3 Bidang Jalan dan Jembatan**, mempunyai tugas menyusun, melaksanakan dan mengoordinasikan kebijakan pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan serta jalan lingkungan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Jalan Jembatan menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan kegiatan operasional di bidang jalan dan jembatan;
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang jalan dan jembatan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang jalan dan jembatan;
 - d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang jalan dan jembatan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- 1.3.1 Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan** mempunyai tugas melakukan pendataan dan penyiapan administrasi teknik peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan kegiatan di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
 - c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan jalan dan jembatan;

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

1.3.2 Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melakukan pendataan dan penyiapan administrasi teknik pemeliharaan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkapannya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan pelaksanaan di bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

1.3.3 Seksi Jalan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pendataan dan penyiapan administrasi teknik peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkapannya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Jalan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan di bidang jalan lingkungan;
- b. pelaksanaan kegiatan bimbingan di bidang jalan lingkungan;
- c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang jalan lingkungan;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

1.4 Bidang Prasarana dan Bangunan Pemerintah, mempunyai tugas menyusun, melaksanakan dan mengoordinasikan kebijakan prasarana dan bangunan pemerintah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Prasarana dan Bangunan pemerintah menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan operasional di bidang prasarana dan bangunan pemerintah;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang prasarana dan bangunan pemerintah;
- c. pengoordinasian kegiatan di bidang prasarana dan bangunan pemerintah;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang prasarana dan bangunan pemerintah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

1.4.1 Seksi Sanitasi dan Air Bersih

Seksi Sanitasi dan Air Bersih mempunyai tugas menyiapkan bahan pendataan, pengkajian, pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih pada perumahan dan permukiman rawan air bersih. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Sanitasi dan Air Bersih menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan di bidang sanitasi dan air bersih;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang sanitasi dan air bersih;
- c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang sanitasi dan air bersih;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

1.4.2 Seksi Pembangunan Gedung Pemerintah

Seksi Pembangunan Gedung mempunyai tugas melakukan pendataan dan penyiapan administrasi pembangunan gedung/bangunan pemerintah kota. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pembangunan Gedung Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan di bidang pembangunan gedung pemerintah;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan gedung pemerintah;
- c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan gedung pemerintah;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

1.4.2 Seksi Pemeliharaan Gedung Pemerintah

Seksi Pemeliharaan Gedung Pemerintah mempunyai tugas melakukan pendataan dan penyiapan administrasi pemeliharaan bangunan/gedung pemerintah kota. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pemeliharaan Gedung Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan di bidang pemeliharaan gedung pemerintah;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang pemeliharaan gedung pemerintah;
- c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang pemeliharaan gedung pemerintah;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

1.5 Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, mempunyai tugas menyusun, melaksanakan dan mengoordinasikan kebijakan pemeliharaan, pembangunan dan pengendalian sumber daya air dan drainase. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Sumber Daya Air dan Drainase menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan operasional di bidang pengelolaan sumber daya air dan drainase;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya air dan drainase;
- c. pengoordinasian kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya air dan drainase;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya air dan drainase;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

1.5.1 Seksi Pembangunan Bangunan Air, mempunyai tugas menyiapkan bahan pembangunan prasarana pengelolaan sumber daya air dan drainase. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pembangunan Sumber Daya Air dan Drainase menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan di bidang pembangunan sumber daya air dan drainase;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan sumber daya air dan drainase;
- c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan sumber daya air dan drainase;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

1.5.2 Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Air dan Drainase mempunyai tugas menyiapkan bahan pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana pengelolaan sumber daya air dan drainase. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Air dan Drainase menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan di bidang pemeliharaan sumber daya air dan drainase;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang pemeliharaan sumber daya air dan drainase;
- c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang pemeliharaan sumber daya air dan drainase;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

1.5.3 Seksi Pengendalian Sumber Daya Air dan Drainase mempunyai tugas menyiapkan bahan pengendalian prasarana sumber daya air dan drainase. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pengendalian Sumber Daya Air dan Drainase menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan di bidang pengendalian sumber daya air dan drainase;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian sumber daya air dan drainase;
- c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian sumber daya air dan drainase;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

1.6 Bidang Bina Teknik mempunyai tugas menyusun, melaksanakan dan mengoordinasikan kebijakan perencanaan dan desain, pengawasan dan manajemen konstruksi serta pembinaan jasa konstruksi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Bina Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan operasional di bidang bina teknik;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang bina teknik;
- c. pengoordinasian kegiatan di bidang bina teknik;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang bina teknik;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

1.6.1 Seksi Perencanaan dan Desain mempunyai tugas melakukan pendataan, survey dan analisa perencanaan teknis jalan dan jembatan, prasarana lingkungan permukiman, sumber daya air dan drainase. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Perencanaan dan Desain menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan di bidang perencanaan dan desain;
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan desain;
- c. Pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan desain;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

1.6.2 Seksi Pengawasan dan Manajemen Konstruksi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pengawasan dan Manajemen Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan di bidang pengawasan dan manajemen konstruksi;

- b. pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan dan manajemen konstruksi;
- c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan dan manajemen konstruksi;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

1.6.2 Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan pengembangan dan peningkatan jasa konstruksi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan di bidang pembinaan jasa konstruksi;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan jasa konstruksi;
- c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan jasa konstruksi;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

C. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, menyelenggarakan fungsi :

- perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum;
- pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum;
- pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
- pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan bidang pekerjaan umum;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dilakukan penyusunan LKjIP adalah sebagai perwujudan akuntabilitas kepada publik mengenai, sejauh mana capaian kinerja Dinas PU Kota Makassar, hingga akhir periode pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategik Dinas PU Kota Makassar yang telah ditetapkan sebelumnya.

Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam setahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memiliki fungsi umpan balik untuk pengambilan keputusan pihak-pihak terkait, alat perbaikan manajemen pemerintahan dilingkungan SKPD, media pertanggungjawaban kepada lembaga legislatif dan media pertanggungjawaban kepada publik.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2021 mencakup hal - hal berikut ini :

- Memberi pertanggungjawaban kepada pemberi amanah.
- Memberi dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tupoksi, dalam upaya mencapai visi dan misi.
- Memberi masukan untuk perbaikan perencanaan khususnya jangka pendek dan jangka menengah

Dengan maksud tersebut diatas dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dalam rangka perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga pencapaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Proses penyusunan LKjIP dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: pengumpulan data kinerja kegiatan masing - masing Kepala Bidang, Sekretariat dan Kepala Seksi Bidang serta Kasubag selaku pelaksana kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar yang berisi indikator kinerja, satuan indikator serta rencana dan realisasi kegiatan yang dituangkan dalam bentuk LKjIP unit kerja instansi pemerintah. Dalam menghitung capaian kinerja antar unsur indikator kinerja kegiatan dengan cara membandingkan rencana / target dengan realisasi. Angka realisasi yang digunakan dalam menghitung capaian kinerja didasarkan pada realisasi sampai dengan bulan desember 2021.

BAB III

PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

Perencanaan stratejik instansi pemerintah memerlukan integrasi antara kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya lain agar dapat memenuhi kebutuhan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan / kendala (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur - unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Perencanaan stratejik mengandung analisis internal dan eksternal, para perencana stratejik mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan di bawa. Penjabaran dari visi dituangkan dalam tujuan dan sasaran stratejik organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin di capai oleh organisasi di dalam memenuhi visi misinya. Dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan / sasaran dalam wujud kebijakan, program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi maka, arah / sasaran organisasi menjadi jelas.

Rencana stratejik yang disusun oleh suatu instansi pemerintah mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan untuk pembangunan dan perkembangan Kota Makassar. Serta membuat langkah - langkah dan prosedur untuk mencapainya , serta menentukan ukuran keberhasilan / kegagalannya. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Perencanaan stratejik bersama

pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolok ukur penting dari suatu ukuran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sebagai salah satu lembaga yang mempunyai rencana strategik berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk 2021 – 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategik mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2021 akan dijelaskan dalam Rencana Kerja (*Performance Plan*) TA 2021.

Dari uraian singkat di atas, yang perlu secara formal didefinisikan dalam suatu perencanaan strategik adalah pernyataan visi dan misi, penjabaran tujuan dan sasaran strategik serta perumusan strategi pencapaian tujuan / sasaran berupa kebijakan, program dan kegiatan.

Program dan Kegiatan yang akan dijabarkan dalam dalam Rencana strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar tahun 2021-2016 yang disusun dengan skala prioritas dengan memperhatikan visi, misi dan perubahan kondisi strategis lingkup organisasi Pemerintah Kota Makassar.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar mempunyai sasaran strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun dan di susun sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahunan serta untuk penilaian keberhasilan.

Di samping itu, Renstra yang di susun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan 5 (lima) tahun mendatang. Bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Renstra di pandang sebagai :

- Alat Bantu bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- Gambaran visi, misi, persepsi, interpretasi serta strategi bagi Pemerintah Kota Makassar untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi.
- Alat untuk memacu dan mendorong aparat serta masyarakat dalam proses mencapai sasaran yang ditetapkan.

Renstra sebagai alat untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan / sasaran stratejik Walikota dan Wakil walikota Makassar Terpilih. Dalam dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2021 – 2026 secara formal telah didefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan / sasaran stratejik serta strategi program dan kegiatan yang akan di capai.

TUJUAN DAN SASARAN

Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar menetapkan tujuan dan sasaran stratejik berdasarkan visi, misi dan faktor - faktor kunci keberhasilan. Sasaran - sasaran stratejik Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar merupakan bagian integral dalam proses perencanaan stratejik organisasi yang dirumuskan untuk masing - masing tujuan yang telah ditetapkan yang perwujudannya tercantum dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.

Tujuan utama Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar adalah **“Mewujudkan Makassar Menjadi Liveable City dan Resilient City”**

SASARAN

Adapun Sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dalam periode 2021-2026 secara keseluruhan meliputi 1 (satu) sasaran utama dan 1 (satu) sasaran penunjang. Adapun sasaran utama dan sasaran penunjang sebagai berikut :

- Tersedianya infrastruktur Kota menuju kota nyaman; (sasaran utama)
- Terwujudnya pelayanan publik yang cepat dan berkualitas; (sasaran penunjang).

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2021-2026

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan Makassar menjadi Liveable City dan Resilient City		Indeks Kota Nyaman (Liveable City)	55,7 %	59,83 %	60,22 %	60,61 %	60,61 %	60,61 %
		Tersedianya infrastruktur menuju kota yang nyaman	Indeks Layanan Infrastruktur	72,8%	74,22%	75,03 %	76,27%	77,22%	78,56 %
		Terwujudnya Pelayanan public yang cepat dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%

STRATEGI

Strategi adalah cara yang di tempuh dalam rangka pencapaian misi. Strategi diuraikan ke dalam arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang akan diimplementasikan dalam periode waktu tertentu.

Untuk menjaga konsistensi Visi dan Misi, terutama dalam menjabarkannya pada kebijakan perencanaan pembangunan selama lima tahun ke depan, maka Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar telah menetapkan strategi untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, yaitu; **”Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan dan fasilitas pemerintahan yang modern”**. dalam mewujudkan strategi SKPD tentunya di tunjang dengan berbagai langkah yang kongkrit berupa ;

1. **Koordinasi**, adalah suatu upaya komunikasi yang dijalin, baik secara horizontal maupun diagonal untuk mencapai tujuan tertentu.
2. **Integrasi**, adalah proses penyatuan tujuan berbagai unsur untuk mencapai tujuan bersama.

3. **Sinkronisasi**, adalah upaya penciptaan suatu proses penyesuaian dari berbagai rencana kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu.

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2021

Rencana kinerja tahun anggaran 2021 merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik - baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses pelayanan administrasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dapat berjalan dengan baik .

Rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar tahun 2021 disusun berdasarkan hasil analisa untuk kemudian disusun isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Makassar terpilih.

Perencanaan kinerja tahun 2021 merupakan komitmen seluruh anggota Organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi visi dan misi Organisasi, dengan demikian,seluruh proses pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dapat berjalan dengan baik. Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah merupakan program dan kegiatan utama yang bukan diperuntukkan untuk membiayai sifatnya rutin dalam rencana kinerja tahun 2021.

Tabel 2.2 Program dan Pagu Indikatif dalam Renja TA. 2021

No	Program	Renja Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	56.265.444.189,-
2.	Program pengelolaan dan pengembangan system Penyediaan Air Minum	6.716.290.360,-
3.	Program pengelolaan dan pengembangan system Air Limbah	2.322.168.000,-
4.	Program pengelolaan dan pengembangan system drainase	75.786.802.640,-
5.	Program penataan bangunan gedung	105.227.927.780,-
6.	Program penyelenggaraan jalan	391.305.208.880,-
7.	Program pengembangan jasa konstruksi	1.478,385,000,-
	Total	639.102.226.849,-

PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai dengan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar telah diuraikan dalam matriks rencana program, kegiatan dan pendanaan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Setiap program diikuti dengan uraian kegiatan dan sub kegiatan yang relevan dengan program tersebut. Untuk program , kegiatan dan sub kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan dalam renja dinas pekerjaan umum kota makassar tahun 2021 adalah sbb ;

1. Program : Penyelenggaraan Jalan;

Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kab/ Kota;

- a. Penyusunan rencana, kebijakan, dan strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan
- b. Survey kondisi jalan/jembatan
- c. Pembangunan jalan
- d. Rehabilitasi jalan
- e. Pemeliharaan rutin jalan
- f. Pembangunan jembatan

2. Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Kegiatan : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kab/ Kota;

- a. Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM
- b. Supervise pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM
- c. Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di Kawasan perkotaan
- d. Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di Kawasan perkotaan
- e. operasi dan pemeliharaan SPAM di Kawasan perkotaan

3. Program : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;

Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dalam daerah Kab/ Kota;

1. penyusunan rencana, kebijakan, strategis dan teknis system pengelolaan air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota
2. pembangunan/penyediaan sub sistem pengelolaan setempat
3. pembinaan Teknik pengelolaan air limbah domestik

4. sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik
 5. pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan air limbah domestik
 6. operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik
 7. penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja
4. **Program : Penataan Bangunan Gedung;**
Kegiatan : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di wil Daerah Kab/Kota, pemberian izin Mendirikan Bangun (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan Gedung;
1. perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota
 2. rehabilitasi, renovasi dan ubahsui bangunan Gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota
 3. pemeliharaan dan perawatan bangunan Gedung daerah kabupaten/kota
5. **Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase**
Kegiatan : Pengelolaan dan sistem Pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kab/ kota;
- a. Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase perkotaan
 - b. Pembangunan sistem drainase perkotaan
 - c. Peningkatan saluran drainase perkotaan
 - d. Rehabilitas saluran drainase perkotaan
 - e. Operasi dan pemeliharaan sistem drainase
6. **Program : Pengembangan Jasa Konstruksi**
Kegiatan :
- Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi**
- a. Penyiapan sop penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi
 - b. Pelaksanaan pelatihan tenaga terampil konstruksi
 - c. Fasilitas sertifikasi tenaga terampil konstruksi
 - d. Pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi
- Penyelenggaraan system informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota**
- e. Pengelolaan operasional layanan informasi jasa konstruksi
 - f. Penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas administrator sipjaki

- g. Penyusunan data dan informasi proyek bidang pupr yang dapat dilaksanakan dengan skema kpdbu
 - h. Penyusunan data dan informasi tenaga kerja dan badan usaha
 - i. Penyusunan data informasi ketersediaan/penggunaan material dan peralatan
 - j. Penyusunan data dan informasi profil pekerjaan konstruksi
 - k. Penyusunan data dan informasi tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi
 - l. Penyusunan data dan informasi kecelakaan kerja proyek konstruksi
 - m. Penyusunan data dan informasi kegagalan bangunan/konstruksi
- Penerbitaan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil)**
- n. Penyusunan peraturan di daerah dan sop terkait penyelenggaraan iujk nasional di kab/kota
 - o. Pembinaan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi
 - p. Pemantauan dan evaluasi iujk nasional yang telah diterbitkan
- Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi**
- q. Penyusunan sop/pedoman tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi
 - r. Pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi

ISU DAN PERMASALAHAN

Besarnya peran Dinas Pekerjaan Umum di dalam memajukan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kota Makassar tak lepas dari berbagai permasalahan yang sering dihadapi di berbagai aspek, pada umumnya terkait masalah kenyamanan pengguna jalan dan para pejalan kaki, sarana dan prasarana lingkungan yang mencakup jalan lingkungan, ketersediaan air minum dan pengelolaan sistem air limbah / sanitasi. Sistem drainase Perkotaan dan genangan air yang masih terjadi di beberapa titik kota terlebih di musim penghujan juga menjadi tantangan dan perhatian serius bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.

Untuk itu Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar telah membentuk suatu Tim yang disebut Satuan tugas (satgas) yang bekerja cepat dan nyata dalam mengurangi berbagai permasalahan

dalam bidang infrastruktur kota diantaranya adalah *satgas Drainase (Antiq, anti genangan)* yang bertugas untuk mengurangi permasalahan drainase perkotaan dan genangan air yang terjadi di beberapa titik kota, selain itu telah dibentuk pula tenaga *outsourcing* khusus untuk membantu program dinas pekerjaan umum yang salah satunya adalah *Satgas sapu lubang* yang sangat berperan aktif dalam membantu berbagai permasalahan yang dihadapi di lapangan terkhusus penanganan jalan kota berlubang yang membutuhkan perhatian dan tindak lanjut kemudian *Satgas sanitasi (Britasi, brigade sanitasi)* yang bertugas untuk mengurangi permasalahan sanitasi dan air bersih yang tersebar di kota Makassar. dengan segera cara ini dianggap efektif mampu mengatasi sedikitnya isu dan permasalahan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar didalam membangun dan memelihara Infrastruktur Kota Makassar.

PERJANJIAN KINERJA SKPD

Didalam merencanakan dan menyusun Program dan Kegiatan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar telah mengadakan perjanjian diantara kedua belah pihak antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua. yang mana disebutkan Pihak Pertama adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dan Pihak Kedua Walikota Makassar.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. M. HAMKA, M.Si**

Jabatan : **Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MOH. RAMDHAN POMANTO**

Jabatan : **Walikota Makassar**

Selaku atasan langsung dari Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, oktober 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

MOH. RAMDHAN POMANTO

IR. M. HAMKA, M.Si

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR
 TAHUN 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya infrastruktur menuju kota yang nyaman	Indeks Layanan Infrastruktur	72,8%

PROGRAM		ANGGARAN	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	56.796.382.414,-
2	Program pengelolaan dan pengembangan system Penyediaan Air Minum	Rp	6.716.290.360,-
3	Program pengelolaan dan pengembangan system Air Limbah	Rp	2.322.168.000,-
4	Program pengelolaan dan pengembangan system drainase	Rp	75.786.802.604,-
5	Program penataan bangunan gedung	Rp	105.227.927.780,-
6	Program penyelenggaraan jalan	Rp	391.305.208.880,-
7	Program pengembangan jasa konstruksi	Rp	1.478.385.000,-

Makassar, Oktober 2021

Walikota Makassar,

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kota Makassar**

MOH. RAMDHAN POMANTO

Ir. M.HAMKA, M.Si

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Juga ditampilkan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Dari beberapa sasaran yang telah tercapai pada tahun 2021, sudah sesuai dengan kondisi yang diharapkan oleh stakeholder. Analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadinya serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang, memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Tujuan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dalam bidang infrastruktur pekerjaan umum yaitu Mewujudkan makassar menjadi liveable city dan restlient city, maka di tentukan sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu tersedianya infrastruktur menuju kota nyaman. Adapun pencapaian sasaran tersebut dapat di ukur melalui indikator – indikator sasaran sebagai berikut :

A. Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan, yaitu sasaran program utama dan sasaran program penunjang, yang mana sasaran - sasaran tersebut rata-rata telah mencapai kinerja yang diharapkan, tingkat keberhasilan sudah diwujudkan secara optimal.

Dengan memperhatikan Rencana stratejik dan Rencana kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, maka capaian kinerja sasaran stratejik melalui program utama secara kuantitatif dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Tersedianya Infrastruktur menuju kota yang nyaman

Sesuai dengan Tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dalam bidang infrastruktur pekerjaan umum yaitu **mewujudkan Makassar menjadi liveable city dan restliant city**, maka telah di tentukan sasaran strategis / sasaran utama yang ingin dicapai yaitu *Tersedianya infrastruktur menuju kota nyaman*. Adapun pencapaian sasaran tersebut dapat di dukung melalui Program dan kegiatan strategis SKPD yang dapat diukur melalui indikator – indikator kinerja dari masing – masing program utama sebagai berikut :

CAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM 2021 :

Program Utama

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Indikator Kinerja	Tahun 2021		
	Target	Realisasi	% Capaian
Tingkat kemantapan Jalan Kota	89.01 %	56.34%	63.30%
Persentase panjang trotoar terhadap panjang jalan	3.37 %	0.24%	7.12%

Program **Penyelenggaraan Jalan** dapat diukur dalam 2 (dua) Indikator kinerja yaitu : 1) **Tingkat kemantapan Jalan Kota**, dimana realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 sebesar 56.34 % dari target 89.01 % dengan tingkat capaian sebesar 63.30% ; 2) **Persentase panjang trotoar terhadap panjang jalan**, dengan realisasi sebesar 0.24 % dari 3.37 % yang ditargetkan pada tahun 2021, dengan tingkat capaian sebesar 7.12%.

- untuk Indikator kinerja **Tingkat kemantapan Jalan Kota**, Sampai dengan akhir tahun anggaran 2021, Realisasi ruas jalan kota yang telah dilaksanakan sebanyak 100 ruas dari 158 ruas jalan kota yang akan diselenggarakan, sehingga realisasi dapat dihitung sebagai berikut:

$X = \frac{\text{Jumlah ruas penyelenggaraan jalan kota yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah ruas target penyelenggaraan jalan kota}} \times 100 \%$

$$X = \frac{100 \text{ ruas}}{158 \text{ ruas}} \times 89.01 \% = 56.34 \% \quad (\text{realisasi})$$

$$X = \frac{56,34 \%}{89,01 \%} \times 100 \% = 63.30 \% \quad (\% \text{ capaian})$$

- Untuk indikator Kinerja **Persentase panjang trotoar terhadap panjang jalan**, sampai dengan akhir tahun anggaran 2021, panjang trotoar/ pedestrian yang telah dibangun hanya terealisasi sepanjang 0,21 Km yaitu Jl. Metro tanjung bunga dari target 3 km panjang trotoar yang direncanakan terbangun. sehingga realisasi dapat dihitung sebagai berikut:

$$X = \frac{\text{Jumlah panjang trotoar yang dibangun}}{\text{Jumlah panjang trotoar yang ditargetkan terbangun}} \times 3.37 \%$$

$$X = \frac{0.21 \text{ km}}{3 \text{ km}} \times 3.37 \% = 0,24 \%$$

$$X = \frac{0,24 \%}{3,37 \%} \times 100 \% = 7,12 \% \quad (\% \text{ capaian})$$

Pencapaian indikator kinerja Program Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 391.305.208.880,- dengan realisasi pada triwulan I sebesar Rp. 8.830.224.821,- atau 2.26% ,triwulan II sebesar Rp. 28.381.965.482,- atau 7.25% triwulan III terealisasi sebesar Rp. 11.858.640.786,- atau 3.03% dan pada triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 171.905.279.231,- atau 43.93% sehingga total realisasi sebesar Rp. 220.976.110.320,- atau 56.47%

Adapun Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan umum Kota Makassar guna mendukung pencapaian indikator kinerja Program Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota dapat diuraikan melalui sub kegiatan sebagai berikut :

❖ **Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan**, yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 dengan lokasi yaitu sebagai berikut :

Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural
1. Perencanaan Jalan Kota Paket 1
2. Perencanaan Jalan Kota Paket 2
3. Perencanaan Jalan Kota Paket 3
4. Perencanaan Jalan Kota Paket 4
5. Perencanaan Jalan Kota Paket 5
6. Perencanaan Jalan Kota Paket 6
7. Perencanaan Jalan Kota Paket 7
8. Perencanaan Jalan Kota Paket 8
9. FS dan Pra desain Jalur Pejalan Kaki Elevated terintegrasi dengan Kawasan Ruang Publik Pantai Losari
10. Kajian rancangan keamanan dan kenyamanan pada jalur pedestrian Sudirman
11. Konsultan Perencana Pendistrian Jl.Sungai Saddang
12. Perencanaan Jalan Rehabilitasi jalan POLDA
13. Konsultan Perencana Jl. Perintis Kemerdekaan (Bundaran BTP)
14. Konsultan Perencana Pendistrian Jl. Andi Djemma (Ex. Landak Baru)
15. Konsultan Perencana Pendistrian Jl. Poros BTP
16. Konsultan Perencana Pendistrian Jl. Rappocini
17. Konsultan Perencana Simpang Jalan (Smart Pannyingkulu)
18. Perencana Jalan Lingkungan Paket 1,2,3,4 dan 5
19. Perencana Pembangunan Jalan Kota Paket 1,2,3,4 dan 5
20. Pengawasan Jl. Metro Tanjung Bunga
21. Pengawasan Jalan Kota Paket 2 dan paket 3
22. Pengawasan Jalan Lingkungan Paket II,III,VI,XI, XIV, XV
23. Pengawasan Rehab Jalan Kota Paket 2, Paket 3 dan Paket 4
24. Pengawasan Rehabilitasi Jalan POLDA

❖ **Keg. Survey kondisi jalan / jembatan**, sampai dengan akhir tahun anggaran 2021, Tim survey lampu jalan telah melakukan pemantauan kondisi titik lampu jalan di 14 kecamatan, sementara untuk Tim survey jalan / jembatan tidak melakukan pemantauan kondisi jalan di sebabkan krn anggarannya yg besar dan sesuai petunjuk

penggunaan anggaran dana DAK harus melalui pihak ke 3 oleh sebab itu waktu pelaksanaan tidak mencukupi utk dilakukan proses lelang.

- ❖ **Keg. Pembangunan Jalan**, hingga saat ini Panjang Jalan dikota Makassar 1593,46 Km, dimana panjang jalan dalam kondisi baik sepanjang 1556,79 Km dan kondisi rusak sepanjang 36,67 km, sehingga proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik yaitu 97,74 %. untuk Ruas Jalan kota Yang Di tingkatkan sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 , terealisasi 13 Ruas dengan total Panjang Jalan Yang Di tingkatkan 16.378,45 M (16,38 km) sedangkan untuk Jumlah Ruas Jalan Lingkungan yang terealisasi sebanyak 97 ruas jalan lingkungan dengan total panjang 14.489 M adalah sbb :

1. Pengawasan Jalan Lingkungan Paket XVI, XVIII,XIX, XX
Pembangunan Jalan Kota Paket 2,
JL. MESJID RAYA LRG 108 A
JL. PANNAMPU LRG 2
JL. UJUNG LRG 150
Pembangunan Jalan Kota Paket 3,
JL. BAJI MACCINI
JL. DG SIRAJU 4,6,8
Jl. Faisal Raya (sebelah kiri RS faisal) jl. Masuk perumahan
JL. KEAMANAN
Jl. Lrg. 7 dan 9 Kel. Rappocini
Jl. Pattunuang IV Kel.Manggala Kec.Manggala
JL. PELANDUK
JL. SUNGAI MAPPILI
JL. VETERAN UTARA LRG 42-43
Pendestrian Destinasi Wisata (Paket Jl. Metro Tanjung Bunga)
Pembangunan Jalan Lingkungan Paket 2,
Jl. Bolangi/ Pattiro Lanjutan Kel. Lajangiru
. Pembangunan Jalan Lingkungan Paket 3
BTN Minasa Upa Blok AB RT.009 RW.017 Kel. MINASA UPA
Jl. Karunrung Asri (Depan Mesjid Fatimah Azzahrah) Kel.
Jl. Karunrung Raya V Kel. KARUNRUNG
Jl. Minasa Upa Blok K9 Aroepala Kel. MINASA UPA

Jl. Pendidikan Raya Blok F12 Kel. TIDUNG
Jl. Sebelah Timur Lapas Makassar RT.06 RW.08 Kel.
Jl. Teduh Bersinar Komp. Griya Fajar Mas Blok C-B Kel. GUNUNG SARI
Komp. Perumahan Pondok Alam Perdana RT.06 RW.08 Kel. GUNUNG SARI
Pembangunan Jalan Lingkungan Paket 6
Jl. Kubis Kel. Wajo Baru (Jl. Kalumpang Lrg. 6)
Jl. lamuru Lr.118 c Kel. Bontoala Tua
Jl. Tinumbu Lorong 148 sampai batas Kelurahan Bunga ejaberu Kel. Layang
Pembangunan Jalan Lingkungan Paket 7
Jl. Akses Dermaga RT.004 RW.001 Kel. Lakkang
Jl. Akses Kera Kera RT.004 RW.002 Kel. Lakkang
Jl. Dg. Masese RT.002 RW.001 Kel. Lakkang
Jl. Dg. Rilakkang RT.002 RW.001 Kel. Lakkang
Jl. Dg. Tantu 1 Lrg. 6 Kel. Rappokalling
Jl. Jannang Pabe Lrg. 2 RT.001 RW.001 Kel. Lakkang
Jl. Kampung Cedde RT.001 RW.002 Kel. Lakkang
Jl. Maddi RT.004 RW.002 Kel Lakkang
Jl. Nurul Anshar Lrg. 1 RT.04 RW.01 Kel. Lakkang
Jl. Nurul Anshar No. 1 RT. 003 RW.001 Kel. Lakkang
Jl. Nurul Anshar RT.001 RW.001 Kel. Lakkang
Jl. Nurul Anshar RT.003 RW. 002 Kel. Lakkang
Jl. Nurul Ikhlas Poros RT.002 RW.002 Kel. Lakkang
Jl. Nurul Ikhlas RT.002 RW.002 Kel. Lakkang
Jl. Nurul Ikhlas RT.003 RW.002 Kel. Lakkang
Pembangunan Jalan Lingkungan Paket 15
Jl. BPS Blok H4 Kel. Sudiang
Jl. Bumi Permata Sudiang 1 Blok D4 Kel. Sudiang
Jl. Dewi Kumala Sari Blok AC II No. 13 Kel. Daya
Jl. Majene 1,2 dan 9 Kel. Laikang
Jl. RT.05/rw.02 Kel. Daya
Jl. Samping Masjid Komp. Bumi Sudiang Raya Kel. Laikang
Jl. Bulukumba 2 dan 3 Kel. Laikang
Jl. Luwu 1 Kel. Laikang
Jl. Pabongkaya 1 Kel. Sudiang Raya
Pembangunan Jalan Lingkungan Paket 19

Jalan Baiturahman 3 RT 3 & RT 4 RW 1
Jl. Biola Blok 10 Kel. Bitowa
Jl. Birta Komp. Bambu-Bambu Kel. Bitowa
Jalan Borong Jambu Perbatasan 3 RT (RT 2, RT 3, & RT 5)
Jl. Bukit Batu Lr.10 RT.02/RW.01 Kel. Antang
Jl. Lemo Kambang Kel. Tamanggapa
Jl. Masuk Kuburan Ko"rasa Kel. Bitowa
Jl. Moncong Taring Lanjutan Kel. Antang
Jl. Muh. Paleo 2 & 3 Kel. Antang
Jl. Tamanggapa Samping Kantor Lurah Tamanggapa Kel. Tamanggapa
Jl. Waduk RT.C/RW. 03 Kel. Bitowa
Jl. Baitullah 1 Lrg. RT.04 RW.01 Kel. Biring Romang
I. Borong Jambu Lr. 1 RW.04 Kel. Bitowa
Pembangunan Jalan Lingkungan Paket 20
Jl. Batua Raya 8 Kel. Paropo
Jl. Adipura 3B RT.05 RW.04 Kel. Karuwisi utara
Jl. Damar Kel. Paropo
Jl. Dirgantara 13. RT.05/RW.01 Kel. Paropo
I. Dirgantara Lrg. 13 RW.01 Kel. Paropo
Jl. Haya Dg. Koyo Lr. 2 Kel. Tamamaung
Jl. Meranti 1 & 2 RW.09/RT.05 Kel. Paropo
Jl. Sukaria Raya Poros (Ujung) Kel. Tamamaung
Jl. Sukaria Raya. RT.04/RW.05 Kel. Tamamaung
Jl. Sukaria. 12 Kel. Tamamaung
Jl. Sukaria. 15 Kel. Tamamaung
Jl. Toddopuli 3 STP.4 RT.4/RW.6 Kel. Pandang
Jl. Urip 5 Lr. 4 Gang. 1 & 2 RW.02 Kel. Karawisi Utara
Jl. Urip Sumoharjo Lr. 40. RW.02/RT.03 Kel. Karawisi Utara
Pembangunan Jalan Lingkungan Paket 21
Jl. Prof. A. Basalamah.2 RT.04/RW.09 Kel. Karampuang
Jalan Sultan Alauddin 3 Lorong 8 RT.02/RW.05 Kel. Mangasa
Jl. H. Kalla 2 Lrg. 3 RW.3 RT.1 Kel. Panaikang
Jl. H. Kalla 2 RT.07 RW.03 Kel. panaikang
Jl. H. Kalla. 2 RT.06/RW.03 Kel. panaikang

Jl. H. Kalla/Salapokan RW.04 Kel. Panaikang
Jl. Kesadaran 4. Lr 5 & Lr. 9 Kel. Panaikang
Jl. Komp. BTN Citra Tello, Blok A4/B1 Kel. Tello Baru
Jl. Leimena Komp. IDI Lrg. Pali RT.02 RW.05 Kel. Tello Baru
Jl. Leimena Komp. IDI Lrg.3 RT.02 RW.05 Kel. Tello Baru
Jl. Sermani 3 RT.04/RW.07 Kel. Tello Baru
Jl. Sermani 5 RT.5 RW.7 Kel. Tello Baru
Jl. Taman Makam Pahlawan Lrg.1 RT.05 RW.09 Kel. Tello Baru
Pembangunan Jalan Lingkungan Paket 22
Jl. A. Paturungi RT.01 RW. 9 Kel. Barombong
Jl. Gontang Raya RT.02 RW.03 Kel. Tanjung Merdeka
Jl. Kompleks Hartaco Blok 1 Aj Kel. Parantambung
Jl. Mamo Raya 5 RT. 04/ RW.10 Kel. Mangasa
Jl. Manuruki 2 Lr.2B, RT. 02/ RW.09 Kel. Mangasa
Jl. Pabentengan I Setapak 1 RT 02 RW 08 Kel. Mangasa
Jl. Penghubung jl. Andi Tonro 4 dan Jl. Andi Tonro 5 RT.003 RW.08 Kel. Pa"baeng-Baeng
Jl. Mappakainga Perum Pesona Barombong Blok E Kel. Barombong
Pembangunan Jalan Lingkungan Paket 23
Jl. Baji Ampe Lr.2 RT.5 RW.2 Depan Mesjid Kel. Baji Mappakasunggu
Jl. Baji Pangasseng Lr. 2 Kel. Tamparang Keke
I. Baji Pangasseng IX RT.03 RW. 05 Kel. Tamparang Keke Kec. Mamajang
Jl. Cendrawasih Lr. 316A Kel. Tamparang Keke
Jl. Cendrawasih Lr. 11 Kel. Karang Anyar
I. Cendrawasih Lr. 316 B Kel. Tamparang Keke
Jl. Cendrawasi Lr. 15 Kel. Karang Anyar
Jl. dr. Ratulangi Lorong 139 RT.01 RW.03 Kel. Bonto Lebang
Jl. Cendrawasi Lr. 18 Kel. Sambung Jawa
Pembangunan Jalan Lingkungan Paket 24
jl. Dr Ratulangi lorong, Jalan Tanah Kel. Bonto Biraeng
Jl. Inspeksi Kanal Kel. Mamajang Dalam
Jl. Inpeks Kanal Kompleks Marinda RT 01, RT 02, RT 03 dan RT 04 RW 05 Kel. Maricaya Selatan
Jl. Kakatua Komp Mess Anoa IV rw. 05 Kel. Pa"batang
Jl. Kancil Selatan Lorong 1 dan Jalan Macan 2 Kel. Labuang Baji

Jl. Veteran Selatan Lorong 209 RT.02 RW.01 Kel. Bonto Lebang
Pembangunan Jalan Lingkungan Paket 25
JL. BAJI MINASA RT 02,03 RW 03 Kel. Tamarunang
Jl. Belibis RW. 004 Kel. Mariso
Jl. Cendrawasih Lrg. 61 Kel. Kunjung mae
Jl. Cendrawasih Lrg. 7/7A RT. 02 RW. 02 Kel. Mariso
Jl. dahlia Lorong 309 RT 01 RW 02 Kel. Mattoangin
Jl. Rajawali i Lr. 13 b Rt 03 Rw 01 Kel. Lette

Adapun beberapa paket pekerjaan Pembangunan Jalan yang tidak terlaksana adalah sbb;

- Pembangunan Jalan Kota, Paket 1, Paket 4 dan Paket 5, hal ini disebabkan karena gagal lelang.
- Pembangunan Jalan Lingkungan , Paket 1, paket 4,paket 5,paket 8, paket 9, paket 10, paket 11, paket 12, paket13, paket 14, paket 16, paket17, paket18, hal ini disebabkan karena gagal lelang.
- Pekerjaan lampu lorong (lorong wisata), paket pekerjaan ini tidak terlaksana disebabkan karena jangka waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi.

❖ **Keg. Rehabilitasi Jalan**, sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 terdapat 6 (enam) ruas jalan dengan total panjang 3,745 km yang terealisasi/ditingkatkan dgn menggunakan sumber dana APBD pada tahun anggaran 2021 . adapun paket yg terealisasi adalah sbb:

Paket 2
1. Jl. Sunu Kec. Bontoala
2. Jl. Tinumbu 132 Kec. Bontoala
Paket 3
Jl. Komp. Bosowa Indah kec. Rappocini
Jl. Komp. Bosowa permai
Paket 4
Jl. Traktor raya
Perubahan
Jl. Bonto Ramba Kel. Pabaeng-baeng Kec. Tamalate

Adapun beberapa *paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan yang tidak terlaksana* adalah sbb; Rehab Jalan Paket 1, Paket 5, hal ini disebabkan karena gagal lelang.

Untuk *pekerjaan Rehabilitasi Jalan Paket 4*, terlaksana 59 % (JI, Traktor Raya) dan ruas lainnya masih dalam tahap perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender terhitung sejak masa berakhir kontrak pertanggal 25 desember 2021.

❖ **Kegiatan Pemeliharaan Jalan**, sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 terealisasi 55 ruas jalan kota dengan panjang jalan kota yang terpelihara dan Jumlah 33 ruas jalan lingkungan yang terpelihara.

❖ **Kegiatan Pembangunan Jembatan**, 1 (satu) Paket pembangunan Jembatan Ballang baru yang semula telah ditargetkan dan dianggarkan untuk dibangun namun sampai akhir tahun anggaran 2021 tidak terlaksana karena gagal lelang.

Adapun Faktor Pendorong dan penghambat pencapaian Program Penyelenggaraan Jalan dapat disimpulkan sbb :

➤ **Faktor pendorong :**

1. Proses pelaksanaan pekerjaan yang berlangsung dengan baik karena adanya dukungan dari pihak pelaksana, masyarakat serta stakeholder yang terkait.
2. Perencanaan kegiatan yang telah disusun dan terjadwal.
3. Adanya kesiapan tenaga operasional (satgas) di lapangan
4. Pelayanan yang cepat (Quick respon) dari setiap pengaduan masyarakat baik melalui call centre maupun media social.

➤ **Faktor Penghambat :**

1. Adanya Perubahan / review design (perubahan spesifikasi dan metode pekerjaan)
2. Terlambatnya proses lelang / gagal lelang karena peserta lelang tidak ada yang memenuhi kualifikasi / persyaratan.
3. Tingkat keahlian kontraktor yang kurang kompeten
4. Pengawas yang kurang professional

➤ **Tindak Lanjut** yang akan dilakukan:

1. Membangun komunikasi dan Koordinasi internal yang lebih intens dengan Bidang bina teknik, Perencana dan pengguna anggaran
2. Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal / ULP dalam mempersiapkan dokumen pengadaan
3. Melakukan koordinasi secara berkala terkait progress pekerjaan
4. Melakukan pengontrolan terhadap pihak pengawas melalui sistem IT

Data Jalan Kota Makassar Menurut Kondisi s/d tahun 2021

No.	Kondisi Jalan	Tahun 2018 (Km)	Tahun 2019 (Km)	Tahun 2020 (Km)	Tahun 2021 (Km)
1.	Baik(Good)	1.531,29	1.537,69	1.552,96	1.557,41
2.	Rusak (Damage)	62,17	55,77	40,50	36,05
	Total Panjang Jalan	1.593,46	1.593,46	1.593,46	1.593,46

Data Kondisi Jembatan 2020 - 2021

Kondisi Jembatan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Panjang (m)	1252,04	1321,04	1321,04	1321,04
Jumlah (buah)	73	76	76	76

Data trotoar / pedestrian yang dibangun tahun 2021

No.	Lokasi	Panjang (Meter)	Capaian (%)	Ket.
1.	Jl. Metro Tanjung Bunga	962.2	100	PEDESTRIAN
	Total	962.2		

Data Trotoar Kota Makassar s/d tahun 2020

No.	Nama Kecamatan	Panjang Trotoar (m)	
		Kiri	Kanan
1	Kecamatan Tallo	-	-
2	Kecamatan Makassar	780	705
3	Kecamatan Mamajang	3.898	4.016
4	Kecamatan Bontoala	820,45	350,45
5	Kecamatan Ujung Tanah	414	414
6	Kecamatan Panakkukang	3.463	3.439
7	Kecamatan Ujung Pandang	13.568	14.128
8	Kecamatan Tamalate	475	947.08
9	Kecamatan Rappocini	2.135	2.525
10	Kecamatan Mariso	655	655
11	Kecamatan Wajo	-	-
12	Kecamatan Biringkanaya	-	-
13	Kecamatan Tamalanrea	935	870
14	Kecamatan Manggala	-	-
15	Kecamatan Sangkarrang	-	-
TOTAL		27,143	28.050

Rehabilitasi Jalan Tahun 2021

Kondisi Jalan	Panjang (Km)	Persentase (%)
Baik (Good)	1.557.41	97,74%
Rusak (Damage)	36.05	2,26%
Jumlah	1.593,46	100%

Daftar Jalan Nasional (Tentang jalan Nasional Bukan Jalan Tol)

No.	Nama Jalan	Panjang Jalan (m)
1	Jl. Perintis Kemerdekaan	12.510
2	Jl. Urip Sumoharjo	4.943
3	Jl. G. Bawakaraeng	1.110

4	Jl. Masjid Raya	1.224
5	Jl. Bulusaraung	0.675
6	Jl. Ahmad Yani	0.700
7	Jl. Riburance	0.230
8	Jl. Nusantara	1.942
9	Jl. Veteran Utara	2.074
10	Jl. Veteran selatan	2.158
11	Jl. S. Alauddin	3.702
12	Jl. A. P. Pettarani	4.370
TOTAL		35.638

Daftar Jalan Provinsi (Kep. Gub. Sulsel No. 2755/XII/Tahun 2015 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi Sulawesi Selatan.

No.	Nama Jalan	Panjang jalan (m)
1	Jl. Ratulangi	2.070
2	Jl. Jend. Sudirman	1.339
3	Jl. Tamangapa Raya	3.364
4	Jl. Antang Raya	1.500
5	Jl. Dr. Leimena	2.700
6	Jl. Poros Panciro Galesong	1.800
7	Jl. Kumala	1.430
8	Jl. Dg. Ngeppe	0.370
9	Jl. Dg. Tata	1.640
10	Jl. Mallengkeri	1.570
11	Jl. Letjen Hertasning	1.540
12	Jl. Aroepala	1.820
TOTAL		23.145

PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN T.A. 2021

NO.	KECAMATAN	PANJANG (M)
1	Kec. Rappocini	776,5
2	Kec. Ujung Pandang	146,5
3	Kec. Manggala	1.251,13

4	Kec. Panakkukang	3.188,02
5	Kec. Mamajang	1.600
6	Kec. Mariso	1.278,6
7	Kec. Tamalate	2.886,4
8	Kec. Tallo	1.397,25
9	Kec. Bontoala	249,4
10	Kec. Biringkanaya	1.543,6
JUMLAH PANJANG JALAN LINGKUNGAN		14.023,98

2. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Indikator Kinerja	Tahun 2021		
	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase kebutuhan gedung pemerintah yang terbangun	27.41 %	2.49 %	9.09%

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG dapat diukur melalui Indikator kinerja yaitu : 1) **Persentase kebutuhan gedung pemerintah yang terbangun**, dimana realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 sebesar 2.49 % dari target 27.41 % dengan tingkat capaian sebesar 9.09% ;

➤ Untuk indikator kinerja **persentase kebutuhan gedung pemerintah yang terbangun**, sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 jumlah gedung pemerintah yang terbangun dan terealisasi sebanyak 1 (satu) unit pembangunan gedung pemerintah dari 11 (sebelas) unit gedung pemerintah yang ditargetkan terbangun. Sehingga realisasi dapat dihitung sbb :

$$X = \frac{\text{Jumlah ged. pemerintah yang terbangun}}{\text{Jumlah ged. pemerintah yg ditargetkan terbangun}} \times 100 \%$$

$$X = \frac{1 \text{ unit}}{11 \text{ unit}} \times 27,41\% = 2,49 \%$$

$$X = \frac{2.49\%}{27,41\%} \times 100\% = 9.09\% \text{ (\% capaian)}$$

Pencapaian indikator kinerja PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG didukung dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 105.227.927.780,-** pada Triwulan I anggaran terealisasi sebesar Rp. 125.900.000,- atau 0.12 % pada Triwulan II sebesar Rp. 7.235.262.395,- atau 6.88% , Pada Triwulan III sebesar Rp. 338.750.000.- atau 0.32% dan pada triwulan IV sebesar Rp.28.963.056.744.- atau 27.52%, sehingga total realisasi anggaran sebesar Rp. 36.662.969.139,- atau 34.84%

Adapun Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan umum Kota Makassar guna mendukung pencapaian indikator kinerja PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG dapat diuraikan melalui sub kegiatan sebagai berikut :

❖ **Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota**, yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 sbb:

Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor
1. Pemb. Kanopi & WC umum pada fasum Toddopuli Kel. Paropo Kec. Panakukkang
Hutang Belanja TA. 2019
1. Pemb. Ktr Lurah Lariangbangi Kel. Lariangbangi Kec. makassar
2. Pemb. Ktr Lurah Wajo Baru Kel. Wajo Baru Kec. Bontoala
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
1. Pembangunan ktr Kejaksaan negeri makassar

Adapun beberapa rincian paket pekerjaan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang **tidak terlaksana** hal ini disebabkan karena Recofusing Anggaran Dana Covid 19, Belum ada FS, DED, dan Perencanaan belum selesai serta ketersediaan waktu pelaksanaan yg tidak mencukupi.

❖ **Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis**

Daerah Kabupaten/Kota, yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 sbb :

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural
1. Perencanaan Rehabilitasi Kantor Inspektorat Kota Makassar
2. DED Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Walikota Makassar
1. Perencanaan Rehabilitasi Markas DENPOM Makassar
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur
1. Pengawasan Rehabilitasi Gedung PKK
2. Pengawasan rehabilitasi Kantor Kapolrestabes Kota Makassar
3. Pengawasan Rehabilitasi Markas DENPOM Makassar
4. Pengawasan Rehabilitasi Rumah Jabatan Kapolrestabes Makassar
Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat
1. Rehabilitasi Kantor Kapolrestabes Kota Makassar
2. Rehabilitasi Markas DENPOM Makassar
3. Rehabilitasi Rujab Kapolrestabes Makassar
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor
1. Rehabilitasi Gedung PKK
2. Rehabilitasi Baruga angin mammiri

Ada beberapa rincian paket yang tidak terlaksana pada sub keg. Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yaitu rincian paket pek. Perencanaan Rehabilitasi Ruang Paripurna Kantor DPRD, Perencanaan Renovasi Gedung dan Pengembangan Sistem Public Safety Center 119 Kota Makassar, **tidak terlaksana. Hal ini disebabkan** karena tidak ada penyedia yang bersedia melaksanakan perencanaannya diakhir tahun karena keterbatasan waktu sehingga waktu untuk penyelesaian pekerjaan tidak memungkinkan.

❖ **Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota**, dari target

5 unit bangunan yang akan di pelihara tercapai sebanyak 13 unit bangunan gedung pemerintah yang telah terealisasi pada tahun anggaran 2021 adalah :

1. Ktr sementara Kejari
2. Ktr eks Dinas Pendidikan
3. Kantor Lurah mangkura

4. Anjungan losari
5. Gudang arsip
6. Ktr Kejari pelabuhan
7. Posyandu Telkomas
8. Polres pelabuhan
9. Dinas PU
10. Bengkel Metro PU
11. Poltabes Makassar
12. Lapangan Karebosi
13. DWP Kota Makassar

Adapun Faktor Pendorong dan penghambat pencapaian PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG dapat disimpulkan sbb :

➤ **Faktor pendorong :**

1. Proses pelaksanaan pekerjaan yang berlangsung dengan baik karena adanya dukungan dari pihak pelaksana, masyarakat serta stakeholder yang terkait.
2. Perencanaan kegiatan yang telah disusun dan terjadwal.
3. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan
4. Pelayanan yang cepat (Quick respon) dari setiap pengaduan masyarakat baik melalui call centre maupun media social.

➤ **Faktor Penghambat :**

1. Tidak terlaksananya beberapa kegiatan pembangunan gedung pemerintahan karena Adanya reconfusing anggaran
2. Waktu pelaksanaan pek. Fisik yang terbatas/ tidak mencukupi
3. Adanya perubahan/penambahan item pekerjaan sehingga Pekerjaan konstruksi mengalami kendala dlm pelaksanaan

➤ **Tindak Lanjut** yang akan akan dilakukan:

1. Melakukan penganggaran kembali utk kegiatan yg tidak terlaksana di tahun 2022

2. Penyusunan DED dilakukan lebih awal agar pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilaksanakan sesuai jadwal /jangka waktu pelaksanaan yg telah ditentukan
3. Melakukan pemeriksaan yang lebih cermat dan teliti terhadap perencanaan / DED yg telah disusun oleh konsultan perencana.

3. Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem penyediaan Air Minum

Indikator Kinerja	Tahun 2021		
	Target	Realisasi	% Capaian
Presentase jumlah rumah tangga yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan perpipaan dan bukan Jaringan Perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota	100 %	0,40%	0,40 %

Untuk Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dapat di ukur melalui Indikator Presentase jumlah rumah tangga yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan perpipaan dan bukan Jaringan Perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota. dimana sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 , terealisasi sebanyak 1.729 Rumah tangga yg terakses air minum melalui SPAM Jaringan perpipaan dan bukan Jaringan Perpipaan terlindungi, dari total 435.033 Rumah tangga di kota Makassar. yang terdiri dari 1.649 Rt yang terakses air minum melalui SPAM Jaringan perpipaan dan 80 Rumah tangga yang terakses air minum melalui SPAM bukan Jaringan Perpipaan terlindungi. Sehingga terealisasi sebesar 0,40 % dari target 100% tiap tahunnya dengan tingkat capaian kinerja program 0,40%. Sehingga realisasi dapat dihitung sbb :

$$X = \frac{\text{jumlah Rt yang terakses air minum melalui SPAM Jaringan perpipaan dan bukan Jaringan Perpipaan terlindungi}}{\text{Jumlah Rumah tangga di kota Makassar}} \times 100\%$$

$$X = \frac{1.729 \text{ RT}}{435.033 \text{ RT}} \times 100\%$$

X = 0,40 % (realisasi)

Dari target 100%, $X = \frac{0,40 \%}{100\%} \times 100\% = 0.40 \%$ (%capaian)

Adapun Realisasi sub kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kab/kota adalah sbb :

- **Penyusunan Rencana Kebijakan, strategi dan teknik SPAM**, sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 tidak terealisasi karena adanya refofusing anggaran covid 19.
- **Supervisi Pembangunan / peningkatan/ perluasan / perbaikan SPAM**, sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 Jumlah SPAM yang mendapat Supervisi Pembangunan / peningkatan/ perluasan / perbaikan terlaksana sebanyak 1 dokumen sesuai dengan target 100%.
- **Pembangunan SPAM jaringan perpipaan dikawasan perkotaan**, Untuk sub kegiatan *Pembangunan SPAM jaringan perpipaan dikawasan perkotaan*, dari target 5 titik lokasi *Pembangunan SPAM jaringan perpipaan* sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 hanya 1 (satu) titik lokasi pembangunan Sumur dalam di lokasi **Kel. Bira** (80 rumah tangga) yang masih sementara dalam tahap pengerjaan dan diberi perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan 31 januari 2022. Sedangkan untuk pembangunan SPAM jaringan perpipaan /**Arsinum di pulau Barrang lompo dan P. Lumu-lumu** masih terkendala DED yang belum rampung sehingga pembangunan fisik akan dilaksanakan tahun anggaran 2022.

Adapun 5 titik lokasi *Pembangunan SPAM jaringan perpipaan yang tidak terlaksana* adalah sbb :

- Pembangunan sarana dan prasarana Air bersih Kel, Barana
- Pembangunan sarana dan prasarana Air Lapas kelas 1 Makassar (Hibah)
- Pembangunan sarana dan prasarana Air bersih Kel, Tallo
- Pembangunan Sumur dalam terlindungi Kel, bulurokeng
- Pembangunan Sumur dalam terlindungi Kel, bira(sementara dalam perpanjangan waktu penyelesaian pek)

❖ **Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan dikawasan perkotaan**, dari target 4 titik lokasi SPAM Jaringan Perpipaan dikawasan perkotaan yang mendapat pemeliharaan sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 tidak ada titik lokasi SPAM Jaringan Perpipaan dikawasan perkotaan yang mendapat pemeliharaan/peningkatan yang terlaksana disebabkan karena adanya perubahan rincian/ item pekerjaan sehingga anggaran kegiatan tersebut dialihkan pada tahun anggaran 2022. Adapun 4 titik Lokasi yang tidak terlaksana adalah sbb :

1. Penambahan sumur dalam terlindungi kel. Untia
2. Penambahan sumur dalam terlindungi kel. Pai
3. Rehab. Sarana dan prasarana air bersih kel. Sudian
4. Rehab. Sarana dan prasarana air bersih kel. Laikang

❖ Untuk **keg. Operasi dan pemeliharaan SPAM dikawasan perkotaan**, kegiatan pemeliharaan SPAM ini dilakukan melalui Belanja (HIBAH) dimana telah ditargetkan 5 titik lokasi pemeliharaan SPAM sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 tidak ada titik lokasi SPAM dikawasan perkotaan yang beroperasi dan terpelihara yang terealisasi di sebabkan karena karena adanya perubahan rincian/ item pekerjaan sehingga anggaran kegiatan tersebut dialihkan pada tahun anggaran 2022. Namun untuk Pemeliharaan PAMSIMAS kel. Tamalanrea indah telah dilaksanakakan melauai program KOTAKU, sedangkan untuk kel. Buloa sementara ada pengerjaan jaringan PDAM dilokasi tersebut. Adapun 5 titik Lokasi yang tidak terlaksana adalah sbb :

1. Pemeliharaan HKP PAMSIMAS Kel. Kaluku Bodoa
2. Pemeliharaan HKP PAMSIMAS Kel.Parangloe
3. Pemeliharaan HKP PAMSIMAS Kel.tamparang keke
4. Pemeliharaan HKP PAMSIMAS Kel. Buloa
5. Pemeliharaan HKP PAMSIMAS Kel. Tamalanrea indah

Pencapaian indikator kinerja Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.716.290.360,- dengan realisasi pada triwulan I sebesar Rp. 30.000.000,- atau 0.44% ,triwulan II sebesar Rp. 60.175.000,- atau 0.90% triwulan III terealisasi sebesar Rp. 134.600.000,- atau 2.0% dan

pada triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 1.287.198.286,- atau 19.17% **sehingga total realisasi sebesar Rp. 1.511.973.286,-** atau rata-rata capaian realisasi anggaran sebesar 22.51%.

Adapun Faktor Pendorong dan penghambat pencapaian Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dapat disimpulkan sbb :

➤ **Faktor pendorong :**

1. Pemenuhan layanan air bersih bagi masyarakat terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagai kebutuhan dasar manusia
2. SDM yang terampil.
3. Perencanaan kegiatan yang telah disusun dan terjadwal.
4. Pelayanan yang cepat (Quick respon) dari setiap pengaduan masyarakat baik melalui call centre maupun media social.

➤ **Faktor Penghambat :**

1. Adanya perubahan rincian / item /titik lokasi pekerjaan dalam proses pelaksanaan sehingga Penyelesaian pekerjaan mengalami keterlambatan,
2. Untuk Keg. DAK, Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum yang ada di kel. Bira Kec. Tamalanrea masih dalam tahap perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan 31 januari 2022
3. Tidak tersedianya sarana teknologi yang tepat dalam mendeteksi ketersediaan air dan kualitas air dalam tanah

➤ **Tindak Lanjut** yang akan dilakukan:

1. Membangun komunikasi dan Koordinasi internal yang lebih intens dengan Bidang bina teknik, Perencana dan pengguna anggaran agar perencanaan lebih maksimal
2. Melakukan koordinasi dan pengontrolan terhadap pihak eksternal/ pihak kontraktor terkait progress pekerjaan
3. Mengupayakan teknologi ataupun hasil penelitian geolistrik dan loggingtest yang lebih akurat untuk memastikan hasil debit air dan kualitas air agar sesuai standar baku mutu

Adapun Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar guna mendukung pencapaian Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum adalah:

- 1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
- 2) Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM
- 3) Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
- 4) Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
- 5) Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan.

Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Tahun 2021

No.	Uraian	2021 (%)
1	Jumlah rumah tangga yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan perpipaan dan bukan Jaringan Perpipaan terlindungi	1.729
2	Jumlah Rumah Tangga	435.033
	Persentase	0.40

Data rumah tangga yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM bukan Jaringan Perpipaan terlindungi

No	Nama Penerima Manfaat	Lokasi		Kegiatan
		Kecamatan	Desa	Rincian
1	2	4	5	7
1	Dg. Nacce	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
2	M. Syakir	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
3	Iswahyudi	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
4	Mila	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
5	Ufrah	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
6	Syamsuddin	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
7	Muh. Nasir	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi

8	Sahara	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
9	Salmia	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
10	Syamsuddin	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
11	Jufri	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
12	Khairuddin	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
13	Dg. Ati	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
14	Hana Pudding	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
15	Dg. Saya	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
16	Linda Sari	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
17	Hasbia	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
18	Ernayanti	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
19	Siana	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
20	Isnawati	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
21	Salmia	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
22	Rusdi	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
23	Saenah	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
24	Supi	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
25	Rani	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
26	Madi	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
27	Kartini	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
28	Amir	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
29	Suleman	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
30	Limpo	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi

31	Sampara	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
32	Suardi	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
33	Sudarmin	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
34	Dg. Maliang	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
35	Ani	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
36	H. Rohana	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
37	Dg. Bani	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
38	Safaruddin	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
39	Alwi	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
40	Gani	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
41	Theo	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
42	Hermanto	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
43	Dg. Juma	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
44	Sangkala	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
45	Dg. Baso	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
46	Herman	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
47	Jaisa Dg. Sana	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
48	Darmawati	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
49	Mariani	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
50	Dg. Tonji	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
51	Sirajuddin	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
52	Amiruddin	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
53	Halima	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi

54	Darma	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
55	Hartati	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
56	Saenab	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
57	Husain Dg. Nombong	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
58	Asrul	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
59	Safifuddin	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
60	caco	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
61	Halijah	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
62	Abdul Wahab	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
63	Muh. Asaf	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
64	Jamalong	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
65	Gito	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
66	Dg. Sese 5	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
67	Kamaruddin	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
68	Dg. Sese 1	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
69	Dg. Sese 2	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
70	Dg. Sese 3	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
71	Dg. Sese 4	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
72	Kebo	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
73	Abdul Rahman	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
74	Lina Nasir	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
75	Hasma	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
76	Lisawati	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi

77	H. Lija	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
78	Ikbal	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
79	Wahyuni	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi
80	Hj. Sitti Ramlah	Tamalanrea	JL. Lantebung Lrg. Mattoanging 3 RW.4 RT.3 KeEL. Bira	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi

NO.	Jumlah Pelanggan	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Aktif	175.638	177.287
2	Non Aktif	33.076	34.992
Total Pelanggan		208.714	212.279
Total	80 RT		

Data rumah tangga yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan perpipaan

Sumber data PDAM Kota Makassar 2021

4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR LIMBAH

Indikator Kinerja	Tahun 2021		
	Target	Realisasi	% Capaian
Presentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	0 %	0 %

Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah dapat diukur melalui Indikator Presentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik, dimana sampai dengan akhir tahun anggaran 2021

tidak terealisasi atau sebesar 0 % dari target 100% tiap tahunnya sehingga tingkat capaian program 0 %.

- Untuk Indikator Presentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik pada tahun 2021 tidak ada rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang terealisasi dari target 435.033 Rumah tangga di kota Makassar, sehingga realisasi capaian indikator ini dapat dihitung :

$$(X = \frac{\text{jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik}}{\text{Jumlah RT dikota makassar}} \times 100\%)$$

$$X = \frac{0}{435.033} \times 100 \% = 0 \% \text{ (realisasi)}$$

$$\text{dari target 100\%, } X = \frac{0}{100\%} \times 100\% = 0 \% \text{ (\% capaian)}$$

Pencapaian target kinerja Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah didukung dengan **alokasi anggaran sebesar Rp. 2.322.168.000,-** pada Triwulan I sebesar Rp. 57.000.000,- atau 2.45%, pada Triwulan II sebesar Rp. 252.979.000,-, atau 10.89% Pada Triwulan III sebesar Rp. 252.825.000.- atau 10.88% dan pada triwulan IV sebesar Rp. 346.918.248,- atau 14.93% sehingga total realisasi anggaran sebesar Rp. 1.002.822.248,- atau rata-rata capaian realisasi anggaran sebesar 43.18%.

Kegiatan-kegiatan yang **telah dilaksanakan** oleh Dinas Pekerjaan umum Kota Makassar guna mendukung pencapaian indikator kinerja Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah, dapat diuraikan melalui *sub kegiatan* sebagai berikut :

- ❖ **Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat**, untuk kegiatan pembangunan fisik tidak dilaksanakan karena adanya perubahan rincian / item pekerjaan sehingga waktu pelaksanaan tidak memungkinkan utk dilaksanakan dan anggaran kegiatan tersebut dianggarkan kembali pada tahun 2022.
- ❖ **Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik**,
- ❖ **Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja**, sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 jumlah rumah yang telah menerima jasa penyedotan lumpur tinja sebanyak 2. 770 rumah tangga tersebar di 15 kecamatan.

- ❖ **Pembangunan/Penyediaan sarana dan prasarana IPLT**, untuk kegiatan pembangunan fisik sanitasi (DAK sanitasi) terkendala adanya aturan PPKM sehingga tidak memungkinkan utk melaksanakan konstruksi dari rumah ke rumah, sehingga anggarannya di anggarkan kembali pada anggaran tahun 2022.

Adapun Kegiatan-kegiatan **yang tidak dilaksanakan** oleh Dinas Pekerjaan umum Kota Makassar pada Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah adalah : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik, Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik, Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja , Hal ini disebabkan karena refofusing anggaran.

Faktor Pendorong dan penghambat pencapaian Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dapat disimpulkan sbb:

➤ **Faktor Pendorong**

- Dukungan anggaran dalam pembangunan sarana dan prasarana air limbah
- Dukungan dari masyarakat terkait kebutuhan akan pemenuhan pelayanan pengolahan air limbah .
- Sarana /alat angkutan Penyedotan Lumpur Tinja yang memadai
- Perencanaan kegiatan yang matang dan persiapan lokasi pemeliharaan yang mendapat dukungan dari kelompok pengelola Ipal Komunal.

➤ **Faktor Penghambat**

- Adanya perubahan rician pda DPA perubahan TA 2021
- Terkendala izin untuk melakukan kegiatan sosialisasi /pembinaan ke kelompok pengelola Ipal Komunal, warga pengguna ipal komunal karena Masih berlakunya aturan pembatasan kegiatan masyarakat.
- Adanya kegiatan fisik / DAK sanitasi yang tidak dilaksanakan karena masih terkendala aturan pemerintah terkait Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

➤ **Rencana Tindak Lanjut**

- Mematangkan perencanaan, kegiatan dan anggaran sehingga semua kegiatan berjalan sesuai dengan yang target .
- Melakukan penganggaran kembali pada DPA pokok tahun 2022.

JUMLAH RUMAH YANG MENERIMA PELAYANAN JASA PENYEDOTAN JASA TINJA TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	Jumlah Rumah Yang Sudah Menerima Pelayanan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
1	UJUNG TANAH	PATINGALLOANG BARU	43
		PATINGALLOANG	21
		CAMBAYA	32
		CAMBABERUA	14
		TABARINGAN	10
		TOTAKA	16
		GUSUNG	18
		TAMALABBA	21
		UJUNG TANAH	35
JUMLAH			210
2	SANGKARRANG	BARRANG LOMPOA	0
		BARRANG CADDI	0
		KODINGARENG	0
JUMLAH			0
3	TALLO	RAPPOJAWA	43
		WALA WALAYA	24
		KALUKUANG	17
		LA'LATANG	21
		LAKKANG	0
		RAPPOKALLING	35
		TAMMUA	28
		BULOA	32
		TALLO	43
		KALUKUBODOA	12
		SUWANGGA	7
		UJUNG Pandang Baru	11
		PANNAMPU	13
		BUNGAEJABERU	21
LEMBO	25		
JUMLAH			332

4	BONTOALA	LAYANG	24
		BUNGAEJAYA	10
		PARANG LAYANG	9
		BONTOALA	12
		BONTOALA TUA	15
		GADDONG	6
		BONTOALA PARANG	15
		BARAYA	24
		WAJO BARU	21
		TOMPO BALANG	9
		MALIMONGANG BARU	24
		TIMUNGAN LOMPOA	11
		JUMLAH	
5	WAJO	MALIMONGAN TUA	24
		MALIMONGAN	27
		BUTUNG	9
		MAMPU	9
		MELAYU	7
		MELAYU BARU	10
		PATTUNUANG	11
		ENDE	7
JUMLAH		104	
6	UJUNG PANDANG	BARU	21
		BULOGADING	31
		LAE-LAE	0
		MALOKU	23
		LOSARI	26
		MANGKURA	14
		SAWERIGADING	19
		PISANG SELATAN	21
		LJANGIRU	12
		PISANG UTARA	23
JUMLAH		190	
7	MAKASSAR	BARA-BARAYYA	23
		BARA-BARAYYA SELATAN	17
		BARA-BARAYYA TIMUR	34
		BARA-BARAYYA UTARA	38
		LARIANG BANGI	25
		BARANA	21
		MACCINI	18

		MACCINI PARANG	15
		MACCINI GUSUNG	21
		MARICAYA	29
		MARICAYA BARU	28
		MARADEKAYA	17
		MARADEKAYA UTARA	24
		MARADEKAYA SELATAN	18
JUMLAH			328
8	MAMAJANG	MAMAJANG LUAR	20
		BONTOBIRENG	10
		LABUANG BAJI	11
		MAMAJANG DALAM	28
		MANDALA	26
		MARICAYA SELATAN	10
		SAMBUNG JAWA	14
		KARANG ANYAR	21
		TAMPARANG KEKE	31
		BAJI MAPPAKASUNGGU	19
		PA'BATTANG	11
		PARANG	19
		BONTO LEMBANG	10
JUMLAH			230
9	MARISO	KAMPUNG BUYANG	7
		MATTOANGING	9
		BONTORANNU	6
		TAMARUNANG	12
		MARISO	10
		LETTE	18
		PANAMBUNGAN	16
		MARIO	10
		KUNJUNGMAE	7
JUMLAH			95
10	TAMALATE	BALANG BARU	18
		PARANG TAMBUNG	9
		BONTO DURI	18
		PA'BAENG BAENG	21
		JONGAYA	25
		BONGAYA	24
		BAROMBONG	10
		MACCINI SOMBALA	21

		TANJUNG MERDEKA	18
		JUMLAH	164
11	RAPPOCINI	TIDUNG	19
		BONTO MAKKIO	6
		KASSI-KASSI	21
		MAPPALA	25
		BANTA-BANTAENG	25
		KARUNRUNG	21
		MANNURUKI	23
		GUNUNG SARI	10
		MINASA UPA	9
		BALLAPARANG	8
		RAPPOCINI	23
		BUAKANA	6
12	PANAKKUKANG	PAROPO	25
		PAMPANG	28
		PANAİKANG	15
		KARAMPUANG	10
		TAMAMAUNG	21
		PANDANG	19
		MASALE	21
		SINRIJALA	21
		KARUWISI UTARA	32
		KARUWISI	25
		TELLO BARU	27
13	MANGGALA	BATUA	21
		BORONG	27
		ANTANG	19
		BITOA	22
		MANGGALA	31
		TAMANGAPA	20
		BANGKALA	10
		BIRING ROMANG	17
		JUMLAH	167
14	BIRING KANAYA	SUDIANG	27
		PAI	16
		BAKUNG	10
		BULUROKENG	32

		UNTIA	0
		LAIKANG	0
		SUDIANG RAYA	16
		PACCERAKKANG	21
		BERUA	16
		KATIMBANG	20
		DAYA	23
JUMLAH			181
15	TAMALANREA	TAMALANREA	23
		BUNTUSU	18
		TAMALANREA JAYA	32
		BIRA	3
		PARANGLOE	21
		TAMALANREA INDAH	9
		KAPASA	25
		KAPASA RAYA	18
JUMLAH			149
JUMLAH TOTAL			2,770

5. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Indikator Kinerja	Tahun 2021		
	Target	Realisasi	% Capaian
PRESENTASE DRAINASE DALAM KONDISI BAIK	81.25 %	47.06 %	57.92 %
Presentase titik genangan yang dikurangi	73.53 %m	16.34 %	22.22 %

Program *PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE* dapat diukur dalam 2 (dua) Indikator kinerja yaitu : 1) **PRESENTASE DRAINASE DALAM KONDISI BAIK**, dimana realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 sebesar 47.06 % dari target 81.25 %; 2) **Presentase titik genangan yang dikurangi**, dengan realisasi sebesar 16.34% dari 73.53% yang ditargetkan pada tahun 2021.

- untuk Indikator kinerja **PRESENTASE DRAINASE DALAM KONDISI BAIK**, Sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 Realisasi panjang saluran drainase yang terbangun, direhab dan di pelihara sepanjang 75,6 km dari target 130 Km Pjg sal. Drainase keseluruhan yg ditargetkan untuk terbangun, direhab & dipelihara, sehingga rata-rata capaian dapat dihitung sebagai berikut:

$$X = \frac{\text{Panjang sal, drainase yg terbangun ,direhab \& dipelihara}}{\text{Pjg sal. Drainase keseluruhan yg ditargetkan utk terbangun,direhab \& dipelihara}} \times 100 \%$$

$$X = \frac{75,3 \text{ km}}{130 \text{ Km}} \times 81,25 \% = 47,06 \% \quad (\text{Realisasi})$$

$$X = \frac{47,06 \%}{81,25 \%} \times 100 \% = 57,92 \% \quad (\% \text{ capaian})$$

- Untuk indicator Kinerja **Presentase titik genangan yang dikurangi**, merupakan target menurun dari 73.53 % target indicator kinerja, sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 hanya terealisasi sebesar 16.34%. Dimana 2 (dua) titik lokasi genangan yg tertangani dari 9 titik lokasi genangan yang ada di kota makasar. Adapun capaian kinerja dapat dihitung sebagai berikut:

$$X = \frac{\text{Jumlah titik lokasi genangan yg tertangani}}{\text{Jumlah keseluruhan titik lokasi genangan}} \times 73,53 \%$$

$$X = \frac{2 \text{ titik genangan}}{9 \text{ titik genangan}} \times 73,53 \% = 16,34 \% \quad (\text{Realisasi})$$

$$X = \frac{16,34 \%}{73,53 \%} \times 100 \% = 22,22 \% \quad (\% \text{ capaian})$$

Adapun 2 (Dua) Titik genangan yang ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Minasaupa dsk (luas 32,49 ha)
2. Komp. Gubernur+ racing center (17,78 ha)

Sementara masih ada 7 (tujuh) titik lokasi genangan yang belum tertangani yaitu :

1. Rappokalling
2. Cokonuri

3. Swadaya
4. Tala'salapang
5. Nipa-Nipa
6. BTP Blok AE
7. BTP Blok AC

Pencapaian indikator kinerja Program PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE didukung **dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.786.802.640,-** dengan realisasi pada triwulan I sebesar Rp. 2.734.911.715,- atau 3.61% , triwulan II sebesar Rp. 5.747.309.700,- atau 7.59% triwulan III terealisasi sebesar Rp. 5.740.238.935,- atau 7.57% dan pada triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 18.310.690.537,- atau 24.16% **sehingga total realisasi Anggaran sebesar Rp. 32.533.150.887,-** atau rata-rata capaian kinerja anggaran sebesar 42.93%.

Adapun Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan umum Kota Makassar guna mendukung pencapaian indikator kinerja Program PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE dapat diuraikan melalui sub kegiatan sebagai berikut :

- ❖ **Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan,** lokasi kegiatan yang terlaksana adalah sbb:

Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan dan pembuatan Data Base Banjir (Paket 1) 2. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong (Paket 2) 3. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong (Paket 1) 4. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong (paket 3) 5. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong (paket 4) 6. Jasa Konsultansi Perencanaan 7. Perencanaan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-gorong (paket 1) 8. Perencanaan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-gorong (paket 2) 9. Perencanaan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-gorong (paket 3) 10. Perencanaan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-gorong (paket 4)

- ❖ **Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan,** adapun lokasi kegiatan yang terlaksana pada sub kegiatan ini adalah sbb :

Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Paket V 2. Pengawasan Paket VIII

Belanja Modal Bangunan Air Kotor lainnya :

1. Jl. Datumuseng (± 301 M), Dsk
2. Kawasan Kel. Banta-Bantaeng, Kec. Rappocini, Dsk

❖ **Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan**, adapun lokasi kegiatan yang terlaksana pada sub kegiatan ini adalah sbb :

Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur

1. Pengawasan Paket I
2. Pengawasan Paket III
3. Pengawasan Paket IV
4. Pengawasan Paket VIII
5. Pengawasan Paket IX

Belanja Modal Bangunan Air Kotor lainnya :

1. Kawasan Kel. Antang, Kec. Manggala, Dsk
2. Kawasan Kel. Buakana, Kec. Rappocini, Dsk
3. Kawasan Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Dsk
4. Kawasan Kel. Tello Baru, Kec. Panakkukang, Dsk

Hutang Belanja 2019

Pengadaan Konstruksi Drainase (BTN Tirasa Paratama Indah RT01,02 RW.09 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Dsk) & (Komp. Purn. TNI PAI RT.02 RW.06 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya)

Lorong Wisata ;

1. Jalan Bung Lr. 8 Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea
2. Jalan Adiyaksa Baru Lr. 4A Kel. Masale Kec. Panakkukang
3. Darul Arqam (Jl. KH. Abd. Ashiry KM 17) Kelurahan Pai Kec. Biringkanaya
4. Jl. Biring Romang Raya Kel. Biring Romang Kec. Manggala
5. JL. S. Pareman Kel. Lajangiru Kec. Ujung Pandang
6. Kampung Bontorannu (Jl. Nuri Baru) Kel. Bontorannu
7. Kampung Buyang (Jl. Flamboyan) Kelurahan Kampung Buyang Kecamatan Mariso
8. Kampung Paropo (Jl. Paropo 1-3) Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang
9. Jl. Bonto Dg. Ngirate Kel. Bonto makkio Kec. Rappocini

Adapun faktor Pendorong dan Faktor penghambat pelaksanaan Program PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE sebagai berikut :

➤ **Faktor Pendorong :**

- 1, Kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeliharaan saluran drainase yang semakin meningkat
2. Perencanaan kegiatan dan anggaran yang telah tersusun dan terjadwal
3. Kesiapan petugas operasional di lapangan (satgas)
- 4, Pelayanan yang cepat (Quick respon) dari setiap pengaduan masyarakat baik melalui call centre maupun media social

➤ **Faktor Penghambat :**

1. Perencanaan yang kurang matang sehingga Proses tender / lelang yang lambat
2. Terbatasnya peralatan yg digunakan oleh tim satgas dilapangan mengakibatkan pekerjaan kurang maksimal
3. Banyaknya drainase yang tidak menggunakan manhole (lubang-lubang kontrol), sehingga menyulitkan pekerja untuk melihat kondisi yang ada di lapangan
4. Terlambatnya penyelesaian pekerjaan.

➤ **Tindak Lanjut :**

1. Perlunya koordinasi yg lebih intens dengan stakeholder terkait
2. Dukungan pembiayaan dalam membangun drainase
3. Memaksimalkan peralatan yang ada sehingga pengerukan sedimentasi sec. rutin dilakukan oleh tim satgas
4. Melakukan koordinasi dan pengawasan secara berkala terkait progress pekerjaan pada saat pelaksanaan pekerjaan.

Kondisi Jaringan Drainase s/d Tahun 2021

Drainase/Gorong-gorong	Panjang (m)	Persentase (%)
Baik (Good)	2.471.226,16	76.43%
Rusak / Rusak sedang	762.197,84	23.57%
Total	3.233.424,00	100.00%

Titik / Lokasi Genangan Yang ditangani Tahun 2021

No.	Lokasi	Zona	Luas (Ha)
1	Minasaupa	GenanganSedang	32,49
2	Komp. gubernur	Genangan Sedang	17,78
	Total		50,27

Titik / Lokasi permukiman tidak terjadi genangan air/ banjir (ha) s/d Tahun 2021

No.	Lokasi / Kec	Luas (ha)
1	biringkanaya	1.097,40
2	Bntoala	107,31
3	Makassar	188,69
4	Mamajang	176,59
5	manggalaMariso	954,86
6	Mariso	102,41
7	Panakukkang	768,15
8	Rappocini	674,13
9	Tallo	525,68
10	Tamalanrea	913,67
11	Tamalate	1.074,30
12	Ujung pandang	183,03
13	Ujung Tanah	98,49
14	wajo	75,59
	Total	6.940,28

Data Sarana dan Prasarana Pengaman Pantai dan Sungai Milik Pemerintah Kota Makassar s/d tahun 2021

NO	LOKASI	KEC.	JUMLAH POMPA AIR	JUMLAH PINTU AIR
1	Stella Maris	Rappocini	1	1
2	Jongaya	Tamalate	1	6
3	Maccini Sombala	Tamalate	1	-
4	Landak Baru	Rappocin	1	2
5	Swadaya		-	3

6	Adyaksa Baru	Panakukkang	2	2
7	Urip Sumoharjo	Panakukkang	2	1
8	Rappokalling	Tallo	2	2
9	Pannampu	Ujung Tanah	1	5
10	Muhammadiyah	Ujung Tanah	2	2
11	Tarakan	Ujung Tanah	1	1
12	Balaikota	Wajo	2	4
	TOTAL		16	29

Data Panjang Kanal s/d Tahun 2021

No.	Kanal	Panjang (Km)
1.	Kanal Pannampu	4,92
2.	Kanal Jongaya	7,82
3.	Kanal Sirinjala	2,36
4.	Kanal Pampang	13,10
5.	Kanal Perumnas	1,86
6.	Kanal Gowa	4,89
7.	Kanal Antang	14,38
	Jumlah	43,341

DATA MASALAH & SOLUSI SALURAN DRAINASE Tahun Anggaran 2021

NO	MASALAH	SOLUSI
I.	Saluran Sekunder	
1	Sedimen	Galian Sedimen
2	Dinding Saluran	Perbaikan Dinding saluran
II.	Saluran Tersier	
1	Sedimen	Galian Sedimen
2	Dinding Saluran	Perbaikan Dinding saluran
3	Plat Pelintas masuk ke Bangunan milik Penduduk	Pembuatan lubang kontrol

6. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Indikator Kinerja	Tahun 2021		
	Target	Realisasi	% Capaian
Rasio tenaga operator / teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	8.72 %	0,02 %	0,23%

Indikator kinerja **program Pengembangan Jasa Konstruksi** diukur melalui Rasio tenaga operator / teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi. Sampai dengan akhir tahun 2021 realisasi program sebesar 0,02 %. Dari Target indikator kinerja program sebesar 8.72 %.

- ❖ untuk Indikator kinerja Rasio tenaga operator / teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi, Sampai dengan akhir tahun anggaran 2021, Jumlah operator/teknisi/analisis yang bersertifikat sebanyak 27 orang (tenaga terampil konstruksi bersertifikat) dari 10.000 orang operator/teknisi/analisis yang dibutuhkan tiap tahunnya. Minimnya realisasi operator/teknisi/analisis yang bersertifikat pada tahun ini disebabkan karena refofusing anggaran dan terkendala pada izin pelaksanaan kegiatan pelatihan/sosialisasi/workshop karena adanya aturan pemerintah terkait pembatasan pelaksanaan kegiatan masyarakat (PPKM). sehingga Realisasi dari program ini dapat dihitung sebagai berikut ;

$$X = \frac{\text{Jumlah operator / teknisi/analisis bersertifikat}}{\text{Jumlah kebutuhan operator / teknisi / analisis}} \times 100\%$$

$$X = \frac{27 \text{ orang}}{10.000 \text{ orang}} \times 8.72 \% = 0,02 \% \quad (\text{realisasi})$$

$$x = \frac{0.02 \%}{100 \%} \times 100 \% = 0,23 \quad (\% \text{ capaian})$$

8,72 %

Pencapaian indikator kinerja **program Pengembangan Jasa Konstruksi** didukung dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 1.478,385,000,-** dengan realisasi pada triwulan I sebesar Rp. 102.000.000,- atau 6.90%, triwulan II sebesar Rp. 153.000.000,- atau 10.35%, triwulan III terealisasi sebesar Rp. 195.000.000,- atau 13.19% dan pada triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 338.689.660,- atau 22.91% **sehingga total realisasi Anggaran sebesar Rp. 788.689.660,-** atau rata-rata capaian kinerja anggaran sebesar 53.35%

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan umum Kota Makassar guna mendukung pencapaian indikator kinerja Program **program Pengembangan Jasa Konstruksi**, dapat diuraikan melalui sub kegiatan sebagai berikut :

- ❖ **Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi**, adapun rincian belanja yang terealisasi adalah Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum dan Luran Jaminan Kesehatan yang diberikan kepada non ASN.
- ❖ **Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi**, adapun rincian belanja yang terealisasi adalah Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang diberikan kepada pelaksana kegiatan.
- ❖ **Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat dilaksanakan dengan Skema KPDBU**, adapun rincian belanja yang terealisasi adalah Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang diberikan kepada pelaksana kegiatan.
- ❖ **Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha**, adapun rincian belanja yang terealisasi adalah Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang diberikan kepada pelaksana kegiatan.
- ❖ **Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material Peralatan**, adapun rincian belanja yang terealisasi adalah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan.
- ❖ **Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi**, adapun rincian belanja yang terealisasi adalah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
- ❖ **Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi**, adapun rincian belanja yang terealisasi adalah Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

- ❖ **Penyusunan Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi**, adapun rincian belanja yang terealisasi adalah belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
- ❖ **Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**, adapun rincian belanja yang terealisasi adalah Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan.

Adapun Kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana, hal ini disebabkan karena adanya aturan Pembatasan kegiatan masyarakat sehingga anggaran utk kegiatan pelatihan/sosialisasi/pembinaan/workshop di refofusing. Kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana diantaranya adalah : Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi, Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI, Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi, Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota, Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi, Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang Telah Diterbitkan, dan Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi.

Faktor Pendorong dan Faktor penghambat pelaksanaan **program Pengembangan Jasa Konstruksi** sebagai berikut :

➤ **Faktor Pendorong :**

- 1, Perencanaan kegiatan dan anggaran yang telah tersusun dan terjadwal
2. Kebutuhan ketersediaan tenaga operator/analisis/ tenaga konstruksi yang terampil dan bersertifikasi kompetensi
3. Kebutuhan ketersediaan Tim pengawas konstruksi yang terampil dan bersertifikasi kompetensi

➤ **Faktor Penghambat :**

- 1, Refofusing anggaran
2. Adanya aturan pembatasan kegiatan masyarakat sehingga kegiatan sosialisasi/pelatihan/workshop tidak terlaksana

3. Masih kurangnya SDM tenaga operator/analisis / tenaga konstruksi yang terampil dan bersertifikasi kompetensi
4. Masih kurangnya SDM Tim pengawas konstruksi yang terampil dan bersertifikasi kompetensi

➤ **Tindak Lanjut :**

1. Dukungan Anggaran pada tahun anggaran berikutnya
2. Pelaksanaan kegiatan yang tidak terlaksana dianggarkan kembali pada tahun 2022
3. Melakukan kerjasama dengan asosiasi terkait pelaksanaan sosialisasi/pembinaan/workshop bagi tenaga terampil konstruksi tentang manfaat sertifikat kompetensi
4. Melakukan Upgrading pengetahuan dan keterampilan kepada Tim pengawas konstruksi.

DATA TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOTA MAKASSAR S/D 2021

No.	TENAGA KERJA	2017	2018	2019	2020	2021	total
1.	Tenaga Terampil Konstruksi	125	0	288	0	27	440
2.	Petugas K3 Konstruksi	24	37	70	0	0	131
3.	Pengawas Konstruksi	0	171	0	0	0	171
4.	Teknisi Instalasi JTR	0	106	0	0	0	106
	Jumlah	149	314	358	0	27	848

Sasaran 2 : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Cepat Dan Berkualitas

Sasaran ini merupakan sasaran program penunjang urusan pemerintah daerah yang juga merupakan sasaran penunjang SKPD yang telah teruraikan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. sasaran yang ingin dicapai yaitu **Terwujudnya Pelayanan Publik yang cepat dan berkualitas**. Adapun pencapaian sasaran tersebut dapat di ukur melalui indikator – indikator sasaran sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja	Tahun 2021		
	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	77.53 %	86.14%
Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah	90%	100%	100%
Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas	100%	0%	0%

Program **Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, dapat diukur melalui 3 (tiga) indicator kinerja yaitu : 1) Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik, dengan realisasi sebesar 77.53 % dari target kinerja sebesar 90 % dengan tingkat capaian sebesar 86.14% ; 2) Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah, dengan realisasi sebesar 100 % dengan tingkat capaian sebesar 100 % ; 3) Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas,

dengan realisasi sebesar 0 % dari target kinerja sebesar 100 % dengan tingkat capaian sebesar 0 % .

Pencapaian indikator kinerja Program program **Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** didukung **dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 56.265.444.189**, dengan Realisasi anggaran per triwulan sampai dengan akhir tahun anggaran 2021, adalah sbb : untuk triwulan I realisasi anggaran sebesar Rp. 5.173.049.986, atau sebesar 9.19%, Triwulan II tercapai realisasi anggaran sebesar Rp. 10.360.227.471,- atau 18.41%, Triwulan III tercapai 11.52% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.480.346.306,- . Pada realisasi triwulan IV tercapai sebesar 35.47% dan realisasi anggaran sebesar Rp.19.955.552.616 ,- sehingga *total realisasi anggaran dari triwulan I sampai IV sebesar Rp 41.969.176.379,- atau tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 74.59 %.*

Adapun kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana dalam pencapaian indikator kinerja **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** disebabkan karena **pengurangan anggaran / refofusing, diantaranya** adalah:

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
- 2) Monitoring, Evaluasi & Penilaian Kinerja Pegawai
- 3) Pengadaan Mebel.

Data Asset Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2021

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI	KET
1.	Tanah	3.294	20.423.438.442.667	
2.	Peralatan dan Mesin	3.474	145.793.874.768	
	Alat-alat besar	143	87.614.082.034	
	Alat-alat angkut	352	27.664.613.906	
	Alat-alat bengkel & alat ukur	855	12.328.670.900	
	Alat-alat kantor & rumah tangga	1.132	6.765.668.057	
	Alat-alat studio & komunikasi	163	2.312.019.050	
	Alat-alat kedokteran & kesehatan	19	130.324.000	
	Alat-alat laboratorium	158	2.360.873.604	
	Alat-alat persenjataan	108	434.920.000	
	Komputer	509	5.883.883.217	
	Alat Keselamatan kerja	35	298.870.000	
3.	Gedung dan Bangunan	172	164.208.093.288	
	Bangunan Gedung	156	150.906.382.158	
	Bangunan Monumen	7	2.068.462.919	
	Tugu Tiutik kontrol	9	11.233.248.211	

4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan Jalan dan Jembatan Bangunan Air Irigasi Instalasi Jaringan	20.531 6.886 1.581 12.039 25	5.974.130.948.804 5.385.557.349.698 443.277.221.624 140.362.782.933 4.933.594.550	
8.	Konstruksi dalam pengerjaan	95	29.023.937.410	
	TOTAL	27.566	26.736.595.296.938	

Sumber : SubBagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum, 2021

B. Analisis Realisasi Keuangan

Berdasarkan alokasi anggaran dan realisasi belanja daerah menurut APBD tahun Anggaran 2021, untuk belanja Operasi dan belanja Modal sampai dengan Desember 2021 dapat diuraikan pada tabel berikut :

Alokasi Anggaran Pokok dan Perubahan Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021

Jenis Belanja Langsung		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang
Belanja Operasi	Rp.	250.176.261.000	273.626.681.773,00	23.450.420.7735
- Belanja Pegawai	Rp.	27.226.574.000	21.447.624.415,00	(5.778.949.585)
- Belanja Barang & Jasa	Rp.	165.999.001.000	178.599.557.358,00	12.600.556.358
- Belanja Hibah	Rp.	56.950.686.000-	73.579.500.000,00	16.628.814.000
Belanja Modal	Rp.	577.692.739.000	365.475.545.076,00	(212.217.193.924)
-Belanja Modal Tanah	Rp.	2.500.000.000	0,00	2.500.000.000
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	8.516.062.250	14.130.190.970,00	(5.614.128720)
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	64.625.289.000	24.083.455.630,00	(40.541.833.370)
-Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp.	502.051.387.750	327.261.898.476,00	(174.789.489.274)
Total	Rp.	827.869.000.000	639.102.226.849,00	188.766.773.151

Total surplus/(deficit)	Rp.	827.119.000.000	638.352.226.849,00	188.766.773.151
--------------------------------	------------	------------------------	---------------------------	------------------------

Sedangkan untuk realisasi anggaran secara total yang telah direalisasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sampai akhir bulan Desember 2021 dapat di lihat pada Tabel sebagai berikut:

**Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Daerah
Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021**

Jenis Belanja Langsung		Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
Belanja Operasi	Rp.	273.626.681.773,00	181.187.334.483	66.22%
- Belanja Pegawai	Rp.	21.447.624.415,00	19.968.184.374,-	
- Belanja Barang & Jasa	Rp.	178.599.557.358,00	126.140.669.148,-	
- Belanja Hibah	Rp.	73.579.500.000,00	35.078.480.961	
- Belanja Modal	Rp.	365.475.545.076,00	154.257.557.436,-	42.21 %
-Belanja Modal Tanah	Rp.	0,00		
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	14.130.190.970,00	5.832.725.500	
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	24.083.455.630,00	1.131.221.500	
- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp.	327.261.898.476,00	147.293.610.436	
Total	Rp.	639.102.226.849,00	335.444.891.919	52.49 %

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar telah menyajikan realisasi keuangan berdasarkan capaian masing - masing Belanja sesuai rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. Dimana capaian

keuangan pada tahun 2021 untuk Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp. **181.187.334.483,-** atau 66,22%, dan Belanja modal telah terealisasi sebesar Rp. **154.257.557.436-** atau 42,21 % dari total realisasi Anggaran sebesar Rp. **335.444.891.919,-** Sehingga capaian Kinerja Keuangan yang diperoleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar secara Kumulatif sebesar **52.49 %** dari total alokasi anggaran untuk Belanja Daerah sebesar **Rp. 639.102.226.849,00,-** dan digolongkan dalam kriteria baik.

Apabila dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran tahun 2020 sebesar 49.45 % atau berjumlah **Rp.225.502.054.177,-** dari total alokasi anggaran sebesar **Rp. 456.052.636.664,-** terlihat mengalami peningkatan, seiring dengan peningkatan alokasi anggaran belanja langsung Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar tahun 2021 yang meningkat dari alokasi anggaran belanja langsung tahun yang lalu, yang tentunya tetap melaksanakan dan memperhatikan faktor efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan dan penyerapan anggaran tersebut.

**TABEL CAPAIAN KINERJA PROGRAM
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2021**

INDIKATOR SASARAN	PROGRAM RPJMD	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Tahun 2021	
			Target	Realisasi
TERSEDINYA INFRASTRUKTUR MENUJU KOTA NAYAMAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	89,01 %	56.34%
		Persentase Panjang Trotoar Terhadap Panjang Jalan	3,37 %	0,24 %
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase kebutuhan bangunan Gedung pemerintah yang terbangun	27.41 %	2.49 %
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Presentase jumlah rumah tangga yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan perpipaan dan bukan Jaringan Perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota	100%	0,40 %
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR LIMBAH	Presentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	0 %
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	PRESENTASE DRAINASE DALAM KONDISI BAIK	81.25 %	47.06 %
		Presentase titik genangan yang dikurangi	73.53 %m	16.34 %
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator / teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	8.72 %	0,02 %
TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG CEPAT DAN BERKUALITAS	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/ KOTA	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	77.53 %
		Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah	90%	100%
		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas	100%	0%

BAB IV

PENUTUP

Demikian uraian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Pada Tahun 2021. Capaian Kinerja ini adalah merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen dari seluruh aparat Dinas Pekerjaan Kota Makassar serta dukungan pihak terkait lainnya dalam rangka mewujudkan Dinas Pekerjaan Umum sebagai organisasi yang akuntabel sesuai dengan Instruksi Presiden No : 2 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun anggaran 2021 capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar masuk dalam kategori predikat baik. Sedangkan capaian dari seluruh kegiatan belanja secara Kumulatif digolongkan dalam kriteria baik. Walaupun nilai capaian ini sudah berada dalam kriteria baik namun Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar terus berupaya mengantisipasi berbagai permasalahan - permasalahan yang timbul dalam mengantisipasi perkembangan dan kemajuan kota di bidang Infrastuktur.

Mengakhiri laporan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu di dalam proses pelaksanaan program / kegiatan sampai pada penyusunan LKJIP, semoga laporan ini memberikan manfaat bagi optimalisasi kinerja, sasaran dan kegiatan yang pada akhirnya demi kemajuan masyarakat sekarang dan dimasa yang akan datang untuk Mewujudkan Makassar menjadi Liveable City dan Reslient City.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2021 yang disajikan kepada publik merupakan salah satu kewajiban untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan organisasi kepada masyarakat. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menunjukkan keberhasilan ataupun menemukan kelemahan didalam pelaksanaan pembangunan suatu Instansi Pemerintah daerah melainkan juga merupakan bahan evaluasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar selalu berkomitmen secara kuat untuk meningkatkan kinerja dengan baik berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar yang secara konsisten, terus-menerus dan berkesinambungan. Selama kurun waktu tahun 2021 – 2026 akan dilaksanakan berbagai upaya dalam rangka pelaksanaan kebijakan strategis dalam kerangka pembangunan daerah.

Sesuai dengan rencana kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar tahun 2021, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar menetapkan, 7 program, 17 Kegiatan dan 77 Sub Kegiatan selanjutnya didukung dengan anggaran sebesar Rp. **639.102.226.849,- (Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan milyar seratus dua juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh Sembilan rupiah)**. Secara keseluruhan hasil capaian kinerja tahun 2021 menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar berhasil memenuhi, 7 program dan 17 kegiatan yang berhasil dicapai bidang-bidang pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. pelaksanaan evaluasi atas implementasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan 7 program yang telah dicapai pada tahun 2021 berhasil dicapai dan rata-rata dapat digolongkan dalam kriteria BAIK.

SISTEMATIKA LKjIP 2021

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) ini memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar selama Tahun Anggaran 2021. Capaian kinerja TA. 2021 merupakan tolok ukur keberhasilan tahunan bagi organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja yang telah dilaksanakan sebagai bahan evaluasi capaian kinerja pada Tahun berikutnya.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas mengenai gambaran umum LKjIP dan profil Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar serta menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP 2021
- Bab II. Perencanaan Kinerja**, menjelaskan muatan rencana kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar untuk Tahun 2021.
- Bab III. Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dikaitkan dengan pertanggung jawaban publik terhadap pencapaian perjanjian kinerja untuk Tahun 2021.
- Bab IV. Penutup**, menjelaskan simpulan dari Laporan Kinerja dan Instansi Pemerintah LKjIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2021 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.